



**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) BIDANG SIMPAN
PINJAM BAGI KELOMPOK PEREMPUAN
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tanjungrejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh

**RATIH KUMALASARI
110210301037**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) BIDANG SIMPAN
PINJAM BAGI KELOMPOK PEREMPUAN
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tanjungrejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**RATIH KUMALASARI
110210301037**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga pada Sang Pencipta, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bundaku tercinta, Ibunda *Siti Aisyah* yang sangat aku cintai, sayangi dan hormati, yang selama ini selalu memberi nasehat-nasehat dalam setiap langkahku. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaranmu yang mengantarku sampai kini;
2. Kedua kakek nenekku tercinta, Kakek *Marijadi* dan Nenek *Sumiyani* yang sangat aku cintai, sayangi dan hormati, yang selama ini telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnnya dan tiada henti mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesanku;
3. Almamaterku Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu;
4. Semua Guru dari SD, SMP, dan SMA dan Bapak/Ibu Dosen di Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember.

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Terjemahan Surat Ar Ra`du Ayat 13)**

Adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan hidup Anda terbuka sebagaimana Anda inginkan, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya bagi Anda, daya untuk mengubah hidup ada di dalam diri Anda.)*

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al Qur`an Tajwid dan Terjemah*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

**) Heidi Baer dalam Jack Canfield, dkk. 2009. *Life Lessons Membuat Impian Jadi Kenyataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratih Kumalasari

NIM : 110210301037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2015

Yang menyatakan,

Ratih Kumalasari

NIM. 110210301037

HALAMAN PERSETUJUAN

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) BIDANG SIMPAN**

PINJAM BAGI KELOMPOK PEREMPUAN

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Tanjungrejo
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana
Strata Satu Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan
Ekonomi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Oleh :

Nama Mahasiswa	: Ratih Kumalasari
NIM	: 110210301037
Angkatan Tahun	: 2011
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 3 Januari 1993
Jurusan / Prog. Studi	: Pend.IPS/ Pend. Ekonomi

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sutrisno Djaja, M.M
NIP. 19540302 198601 1 001

Dr. Sukidin, M.Pd
NIP. 19660323 199301 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan”** telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juni 2015

Tempat : Gedung I Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sutrisno Djaja, M.M
NIP. 19540302 198601 1 001

Anggota I,

Dr. Sri Kantun, M.Ed
NIP. 19581007 198602 2 001

Sekretaris,

Dr. Sukidin, M.Pd
NIP. 19660323 199301 1 001

Anggota II,

Hety Mustika Ani, S.Pd, M.Pd
NIP. 19800827 200604 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan; Ratih Kumalasari, 110210301037; 2015: 91 halaman; Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Salah satu kegiatan PNPM-MP ini adalah kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan atau yang sering disingkat dengan SPP. Target dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Kegiatan pelaksanaan program di Desa Tanjungrejo ditemukan beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam program ini. Melihat kondisi seperti ini perlu dilakukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan program telah berhasil tercapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implemetasi dan ketercapaian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode partisipatif yang terdapat dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan dengan model evaluasi program yang digunakan adalah *CIPP Evaluation Model* untuk

mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP. Metode penentuan *key informan* menggunakan metode *purposive* dengan jumlah 5 orang. Lokasi penelitian berada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi partisipasi aktif serta metode dokumen. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, *konteks* dalam PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP layak dilaksanakan di Desa Tanjungrejo untuk pengurangan jumlah masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja, sebab tujuan program sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat akan adanya program kegiatan yang memberikan kemudahan akses permodalan serta sasaran kegiatan yang sudah diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang produktif. *Input* pada fasilitator dan dana untuk kegiatan SPP sudah mendukung untuk pelaksanaan program secara maksimal. *Proses* menunjukkan pelaksanaan yang kurang baik. *Produk/hasil* dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP sudah bisa dikatakan baik. Berdasarkan evaluasi hasil juga dapat diketahui ketercapaian implementasi program ini yaitu pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan yang sudah mampu dicapai oleh penerima manfaat yang menggunakan dana bantuan SPP untuk usaha. PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP layak untuk tetap dilaksanakan namun dalam pelaksanaan kegiatan SPP perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan masyarakat penerima manfaat kegiatan SPP karena selama ini masih belum tepat sasaran.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan bagi Kelompok Perempuan”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Titin Kartini, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Drs. Joko Widodo, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Sutrisno Djaja, M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sukidin, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Sri kantung, M.Ed selaku dosen penguji I dan Hety Mustika Ani, S.Pd, M.Pd selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan pada skripsi ini;
7. Semua dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama penulis melakukan studi di Universitas Jember;
8. Bapak Drs. Mohammad Yasin selaku Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan

Wuluhan, beserta staf desa yang telah membantu kelancaran penelitian.

9. Petugas UPK Kecamatan Wuluhan dan Satker PNPM Mandiri Pedesaan yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna penyelesaian penelitian ini;
10. Para ibu rumah tangga Desa Tanjungrejo yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna penyelesaian penelitian ini;
11. Kadek Mahendra, yang tidak ada hentinya memberikan dukungan, walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Terima kasih atas segalanya;
12. Sahabat-sahabatku Very, Bastian, Teves, Lambang, Lina, Ardila, Novi, Habibah, Arini, Ririn, Lilik, Irma dan Hisyam yang hadir dalam hidupku, kalian teman terbaik, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
13. Semua teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi angkatan 2011, terima kasih atas dukungan dan motivasinya;
14. Seluruh pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini, terima kasih kepada kalian semua.

Kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 29 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	9
2.3 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)	15
2.4 Teknis Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan	19

2.5 Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan	22
2.6 Kerangka Berpikir	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Penentuan Lokasi Penelitian	30
3.3 Subjek Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Metode Pengumpulan Data	32
3.5.1 Metode Wawancara	32
3.5.2 Metode Observasi	32
3.5.3 Metode Dokumen	32
3.6 Metode Analisis Data.....	33
3.7 Pengecekan Data.....	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.2 Subjek Penelitian	41
4.2.1 Karakteristik Informan Utama	42
4.3 Hasil Penelitian	45
4.3.1 Aspek Kontek (<i>Context</i>)	45
4.3.2 Aspek Masukan (<i>Input</i>)	49
4.3.3 Aspek Proses (<i>Process</i>)	54
4.3.4 Aspek Produk (<i>Product</i>).....	65
4.3.5 Ketercapaian Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan	74
4.4 Pembahasan.....	77
4.4.1 Aspek Kontek (<i>Context</i>)	77
4.4.2 Aspek Masukan (<i>Input</i>)	79
4.4.3 Aspek Proses (<i>Process</i>)	81

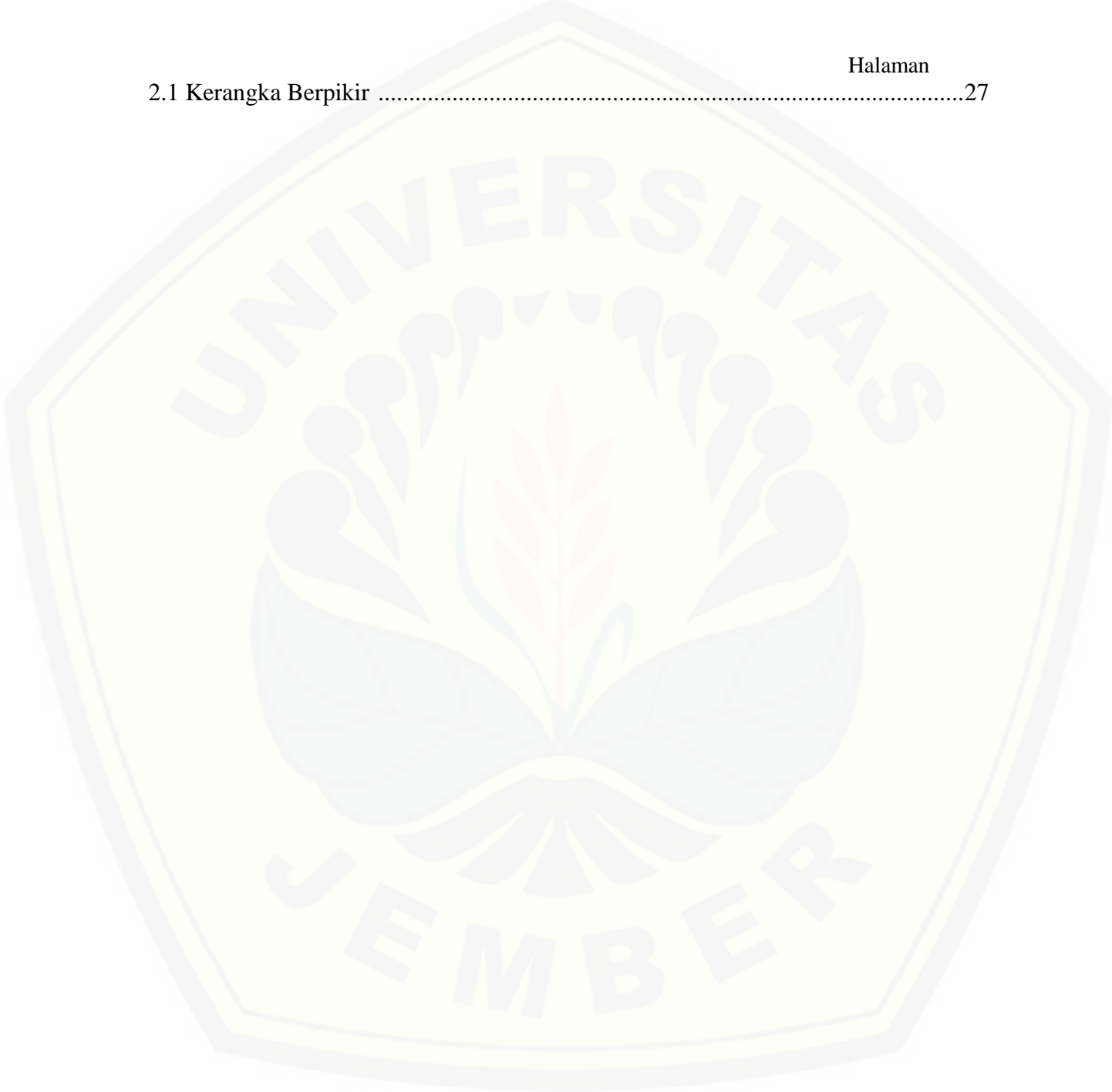
4.4.4 Aspek Produk (<i>Product</i>)	84
4.4.5 Ketercapaian Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan	86
BAB 5. PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	91
Daftar Bacaan	92
Lampiran-lampiran	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rumah Tangga Sasaran Menurut Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan	2
Tabel 3.1 Kriteria Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang SPP	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjungrejo Tahun 2013	38
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjungrejo.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja Desa Tanjungrejo	39
Tabel 4.4 Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjungrejo	40
Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Tanjungrejo	41
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Informan Utama Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	42
Tabel 4.7 Besarnya Pinjaman Informan.....	69
Tabel 4.8 Keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang SPP Berdasarkan Evaluasi Produk.....	71
Tabel 4.9 Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.....	74
Tabel 4.10 Tingkat Pengembalian Pinjaman SPP	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matriks Penelitian	95
B. Tuntunan Penelitian.....	97
C. Pedoman Wawancara	99
D. Transkrip Informan Utama	103
E. Transkrip Informan Tambahan	119
F. PTO PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan	138
G. Struktur Organisasi Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan	146
H. Peta Desa Tanjungrejo	147
I. Dokumentasi Kegiatan.....	148
J. Surat Rekomendasi	151
K. Surat Ijin Penelitian Bapemas	152
L. Surat Penelitian Desa.....	153
M. Surat Keterangan Penelitian	154
N. Lembar Konsultasi	155
O. Daftar Riwayat Hidup	157

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama dalam agenda pembangunan di Indonesia. Masalah tersebut sangat kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia paling banyak berada di wilayah pedesaan dengan persentase sebesar 14,17%. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah program yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang awalnya merupakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998-2007. Tahun 2009 di Kabupaten Jember secara serentak dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di 26 kecamatan yang terdiri dari 211 desa. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin diharapkan mampu diberdayakan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satu kegiatan PNPM-MP ini adalah kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan atau yang sering disingkat dengan SPP. Target dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Dalam salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri, juga disebutkan adanya kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan khusus dan prinsip dasar dari program ini dapat dinyatakan bahwa keberpihakan pada perempuan merupakan salah satu nilai tambah dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. Sasaran dari kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

PNPM Mandiri Pedesaan sudah berjalan sejak tahun 2009 di Desa Tanjungrejo. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah rumah tangga miskin setiap tahunnya di Desa Tanjungrejo. Untuk lebih jelasnya, penurunan jumlah RTM di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut
Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan

No.	Dusun	Jumlah RTM						
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014
1.	Grobyog	112	110	106	102	100	93	87

2.	Krajan Wetan	234	231	228	229	224	217	213
3.	Krajan Kulon	236	233	231	227	220	214	210
4.	Karangsono	145	144	139	130	124	120	97
	Jumlah	727	718	704	688	668	644	607
	Perubahan	0	-9	-14	-16	-20	-24	-37

Sumber : Laporan Akhir Kegiatan SPP PNPM-MP Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2009 sampai 2014 jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Tanjungrejo terus mengalami penurunan yaitu dari total 727 RTM berkurang hingga menjadi 607 RTM. Angka perubahan pada jumlah RTM belum terlalu banyak setiap tahun. Namun tahun 2014 Jumlah RTM sudah berkurang lebih banyak lagi yaitu sebesar 37 RTM.

Desa Tanjungrejo memiliki 4 dusun yang menerima bantuan dana pinjaman bergulir dari SPP. Dusun-dusun tersebut diantaranya adalah dusun Grobyog, Krajan Wetan, Krajan Kulon dan Karangsono. Berdasarkan kegiatan observasi awal, para anggota kelompok penerima manfaat kegiatan SPP berbeda-beda dalam menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Para anggota kelompok membuka usaha sebagai penjual souvenir, tape, tempe, es, gorengan, warung kopi, cilok, bakso, tukang jahit, pedagang sayur keliling, toko kelontong, dan penjual bensin. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah usaha yang dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga disela-sela waktu mereka mengurus anak dan keluarga.

Berdasarkan laporan perkembangan kelompok Kecamatan Wuluhan tahun 2014, ibu rumah tangga yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo sejak tahun awal adanya kegiatan SPP sampai saat ini adalah 1.156 orang pemanfaat yang tergabung dalam 122 kelompok SPP. Sedangkan ibu rumah tangga yang masih aktif memiliki pinjaman sampai saat ini di SPP adalah sebanyak 172 orang pemanfaat. Peningkatan jumlah RTM yang mengikuti kegiatan SPP tersebut cukup signifikan, sebab pada tahun 2009 hanya ada 9 kelompok SPP sebanyak 68 orang yang berpartisipasi sebagai penerima manfaat kegiatan ini.

Dengan adanya bantuan permodalan untuk ibu rumah tangga miskin, mereka dapat mengembangkan usahanya yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri.

Walaupun sudah bisa dikatakan Desa Tangjungrejo memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam kegiatan SPP, namun peneliti masih menemukan beberapa masalah terkait kegiatan Simpan Pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) dari kegiatan observasi awal. Dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP, telah disebutkan diatas juga bahwa sasaran pada program ini adalah rumah tangga miskin yang produktif. Peneliti juga melakukan wawancara dengan fasilitator SPP, Beliau menyatakan bahwa :

” ... yang bisa melakukan pinjaman itu adalah yang utama mempunyai usaha atau yang ingin berusaha juga akan kita angkat, dan tentunya domisilinya di wilayah Desa Tangjungrejo, kemudian sudah menikah atau sudah berkeluarga, dan selanjutnya membentuk kelompok 5-10 orang dan sistemnya tanggung renteng, dimana satu orang yang bertindak sebagai ketua kelompok hanya membawahi satu kelompok saja, tidak boleh lebih mbak.” (AB, 25 Thn)

Tetapi pada pelaksanaannya tidak seperti pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP. Menurut Ibu Septi selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) :

“ Seharusnya yang bisa menjadi anggota hanya orang yang punya usaha atau ingin punya usaha. Namun, karena berbagai pertimbangan akhirnya di sini tidak hanya perempuan yang memiliki usaha atau akan membuka usaha saja mbak. Kalau orangnya mampu membayar pinjaman tepat waktu dan tidak nunggak-nunggak kenapa kita tidak memberikan pinjaman kepada mereka, iya kan mbak?” (S, 43 Thn).

Hal ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa tujuan awal dikeluarkan kebijakan program ini adalah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. Tetapi yang terjadi di Desa Tangjungrejo memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan SPP tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, masih ada penerima manfaat yang tidak memiliki usaha dan tidak berniat membuka usaha. Hal demikian ini tidak

sesuai dengan tujuan awal PNPM Mandiri Pedesaan dan target kegiatan SPP yang sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan suatu program, terkadang tidak selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, evaluasi program penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program pembangunan. Efektivitas dan efisiensi suatu program dapat diketahui dan menilai seberapa jauh tujuan program telah tercapai melalui kegiatan evaluasi.

PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang perlu dievaluasi untuk melihat apakah telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Evaluasi perlu dilakukan karena mengingat adanya temuan masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan program yang sudah ditetapkan sebagai pedoman. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena tujuan dasar dari program PNPM Mandiri Pedesaan adalah mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran di masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan akhirnya menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Alasan lain adalah melihat besarnya alokasi dana pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok SPP yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, dimana kelompok harus mengelola dan mempertanggungjawabkan dana pinjaman tersebut, ditambah lagi kegiatan SPP merupakan kegiatan yang mempengaruhi pencairan dana BLM untuk kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Pedesaan periode selanjutnya. Dengan kata lain, suatu desa yang menjadi pelaksana kegiatan SPP apabila terdapat pinjaman yang macet maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pencairan dana periode ke depan. Karena berbagai hal itulah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) BIDANG SIMPAN PINJAM BAGI KELOMPOK PEREMPUAN** (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dilihat dari empat aspek dalam model CIPP?
2. Bagaimana ketercapaian implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.
2. Untuk mengetahui ketercapaian implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, serta wawasan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi akademis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pendidikan ekonomi pada khususnya serta dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan informasi bagi kalangan akademis.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah di dalam melaksanakan program ke depannya serta mengeluarkan program-program pembangunan khususnya untuk program pengentasan kemiskinan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini peneliti menggambarkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun konsep kajian pustaka yang dibahas dalam penelitian ini meliputi tinjauan penelitian terdahulu, teori evaluasi program, teori pemberdayaan masyarakat, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan petunjuk teknis operasional kegiatan PNPM bidang simpan pinjam kelompok perempuan.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan peneliti, diperoleh referensi dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Dewi Fajar Dening Aprilliya pada tahun 2011 dengan judul penelitian, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di LKMM Amanah Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011*". Hasil penelitian ini, pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Amanah Desa Biting Kecamatan Arjasa ada beberapa aturan yang dijalankan dalam simpan pinjam tidak sesuai dengan buku pedoman Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember.

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan oleh Dian Novitasari pada tahun 2011 dengan judul penelitian, "*Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009*". Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah rata-rata pendapatan rumah tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari bantuan dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan PNPM Mandiri mengalami peningkatan dibandingkan sebelum menjadi pemanfaat.

Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh Regi Regiawandi pada tahun 2011 dengan judul penelitian, “*Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PUAP di Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar belum berjalan baik karena belum bisa meningkatkan kinerja GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi petani melainkan sebatas penyalur kredit dan dana PUAP yang dipinjam oleh petani anggota GAPOKTAN belum mampu mewujudkan kegiatan wirausaha petani.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas program pemberdayaan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai fokus penelitian. Dalam penelitian ini nantinya akan ditemukan proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, sudah sesuai dengan ketentuan program dan tepat sasaran ataukah belum dan dapat ditemukan hasil ketercapaian pelaksanaan Program tersebut.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengurangan jumlah kemiskinan dan upaya perluasan kesempatan kerja sebagai langkah mengurangi jumlah pengangguran salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan permasalahan kemiskinan. Sejalan dengan itu, Theresia (2014:98) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah bagaimana membuat suatu persuasi yang tidak memaksa kepada masyarakat (Anwas, 2013:92). Sehingga memang tepat sekali jika dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat diberikan kebebasan untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam kegiatan pemberdayaan prinsip “*Self Determination*” (Bistek, dalam Adi, 2013:206) merupakan suatu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial maupun kesejahteraan sosial. Gagasan ini dapat diartikan sebagai dorongan yang diberikan kepada kelompok masyarakat sasaran untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Secara lebih lanjut, gagasan ini bertujuan agar kelompok masyarakat sasaran memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya (Adi, 2013:206). Memang tepat sekali apabila kegiatan pengentasan kemiskinan dimasyarakat menggunakan prinsip self determination, karena dengan prinsip ini kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat. Sehingga dalam kegiatannya masyarakat lebih berperan aktif, bukan hanya sekedar menerima bantuan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahannya.

Menurut Kartasasmita (dalam Zubaedi, 2013:79), kegiatan dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga arah, yaitu :

- a. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan langkah-langkah nyata yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya seperti pendidikan, pelatihan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja dan sarana prasarana lainnya.

- c. Ketiga, melindungi masyarakat (*protection*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji program pemerintah yaitu PNPM Mandiri Pedesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional yang berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam program ini masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, sehingga program pemberdayaan ini tidak membuat masyarakat semakin bergantung pada segala bentuk jenis bantuan. Dalam PNPM Mandiri Pedesaan terdapat empat usulan kegiatan yang dapat didanai yaitu kegiatan bidang sarana dan prasarana, kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi dan kegiatan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

Pada penelitian ini, penulis mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Pedesaan pada bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP). Pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang dikhususkan hanya bagi kaum perempuan ditujukan agar para kaum perempuan memiliki kesempatan untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya dan selanjutnya diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonominya sehari-hari. Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian bantuan permodalan bagi kelompok perempuan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok masyarakat lapisan bawah agar mereka memiliki kesempatan mendapatkan akses sumber daya seperti modal, teknologi, informasi, dll. Sehingga melalui pemberdayaan ini masyarakat tidak lagi menjadi objek dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melainkan sebagai subjek upaya penanggulan kemiskinan.

a. Prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat

Setiap kegiatan tentu mempunyai prinsip yang dijadikan sebagai landasan pokok bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada umumnya prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Begitupula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai prinsip untuk digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Effendi (dalam Bahri, 2013:36) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Prinsip partisipasi : kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.
- 2) Prinsip *sustainable* : prinsip ini mengarahkan bahwa hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah sosial ekonomi setempat.
- 3) Prinsip demokratisasi : prinsip ini menghendaki agar dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada rakyat dalam

hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

- 4) Prinsip transparansi : prinsip ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan setiap sumberdaya, terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar pihak-pihak yang ikut mengawasi penyaluran dana mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.
- 5) Prinsip desentralisasi : pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat dengan petunjuk dan aturan-aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari setiap melaksanakan kegiatan yang bersifat melibatkan banyak orang, dalam pelaksanaan kegiatannya selalu memiliki tahapan pelaksanaan. Hal ini ditujukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Subejo dan Supriyanto (dalam Bahri, 2013:33) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara lebih rinci tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tahap seleksi lokasi/wilayah

Seleksi desa dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pihak-pihak yang terkait demi keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

2) Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya menyampaikan informasi rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga mampu mempengaruhi ketertarikan atau minat masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang disosialisasikan. Mengingat masyarakat yang menjadi subyek dalam kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan.

3) Tahap proses pemberdayaan masyarakat

Tujuan mendasar dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Ada beberapa hal yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni sebagai berikut :

a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluang di wilayah tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya, baik potensi maupun permasalahan yang dihadapi. Harapan dari kegiatan ini adalah dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

b) Pengembangan kelompok

Proses pengembangan kelompok dapat dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan kelompok. Penyusunan rencana kegiatan kelompok ini dapat didasarkan dari hasil kajian yang meliputi :

- (1) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
- (2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
- (3) Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah
- (4) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

c) Pelaksanaan kegiatan

Rencana yang telah disusun bersama selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan rencana awal. Pemantauan pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dan dilakukan langkah perbaikan bila itu diperlukan.

d) Monitoring dan evaluasi partisipatif.

Pemantauan proses dan hasil kegiatan secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun langkah perbaikan bila diperlukan.

4) Tahap pemandirian masyarakat

Arah pemandirian masyarakat yang dapat dilakukan adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Peran tim pendamping pada awal kegiatan sangat aktif, tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatan secara mandiri. Peran tim akan digantikan oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, tahapan pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang menjadi fokus penelitian peneliti juga melakukan tahap seleksi wilayah yang akan menjadi sasaran program pada tahun awal. Dan pada akhirnya adalah tahapan pemandirian masyarakat. Dimana masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini diharapkan secara mandiri mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2.3 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

2.3.1 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan dari, oleh dan untuk

masyarakat. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007 dan dinilai telah berhasil (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014:67). Program ini disahkan oleh presiden di kota Palu pada tanggal 30 April 2007.

PNPM mandiri pedesaan dalam pelaksanaannya memprioritaskan kegiatan dalam bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (PTO PNPM, 2014:5).

2.3.2 Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Setiap program tentunya selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan program tersebut. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:6), tujuan Umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan meliputi :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

2.3.3 Prinsip – prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Prinsip – prinsip tersebut meliputi :

- a. Desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan prinsip desentralisasi pada program ini, maka pemerintah perlu untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan, merencanakan dan

melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana PNPM serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PNPM tersebut.

- b. **Transparansi dan akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- c. **Berorientasi pada masyarakat miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan lebih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.
- d. **Otonomi.** Masyarakat diberi hak dan kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan.
- e. **Partisipasi.** Masyarakat berperan secara aktif dalam proses tahapan program mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.
- f. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Masyarakat laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- g. **Demokratis.** Seluruh masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- h. **Prioritas.** Masyarakat harus memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- i. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem pelestariannya.
- j. **Bertumpu pada pembangunan manusia.** Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

2.4 Teknis Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

2.4.1 Definisi Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014:67).

Sasaran Program SPP PNPM adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan SPP PNPM adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014:68).

Layaknya pada kegiatan program simpan pinjam pada umumnya, dalam kegiatan program SPP ini juga terdapat beberapa ketentuan tentang kelompok SPP yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok yang akan melakukan kegiatan simpan pinjam disini. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014:68):

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

2.4.2 Tahapan Pelaksanaan kegiatan SPP

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (2014:59) Mekanisme atau tahapan kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut :

a. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi ditingkat desa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penetapan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
- 2) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
- 3) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetensikan di tingkat kecamatan.

b. Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah:

1) Penetapan formulir verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia.

2) Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pengalaman kegiatan simpan pinjam
- b) Persyaratan kelompok

- c) Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian antara lain :
permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan,
pendapatan dan liquiditas.
- d) Penilaian khusus rencana kegiatan
- e) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi
dengan daftar rumah tangga miskin.
- f) Penilaian kategorisasi kelompok.

c. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan, misalnya KTP dan perjanjian pinjaman.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam prioritas kebutuhan kelompok SPP, antara lain :

- 1) Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat
- 2) Kategori tingkat perkembangan kelompok
- 3) Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita Acara tim verifikasi.
- 4) Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

d. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman mencakup hal – hal :

- 1) Penentuan jasa pinjman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
- 2) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM Maksimal 12 bulan.

- 3) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- e. Penetapan Daftar Tunggu
Penetapan daftar tunggu ini apabila ada usulan kegiatan kelompok SPP yang belum di danai oleh BLM tetapi telah dianggap layak tetap dapat di danai oleh dana bergulir.
 - f. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup pelestarian kegiatan dan pengembangan kegiatan.

2.5 Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan

Pelaksanaan suatu program tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Diperlukan adanya suatu kegiatan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Efektifitas dan efisiensi suatu program dapat diketahui dan dapat dinilai seberapa jauh tujuan program telah tercapai melalui kegiatan evaluasi program.

Evaluasi program adalah suatu upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Hal ini juga selaras dengan pendapat Sudjana (2006:18), evaluasi program merupakan proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan evaluasi pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Tujuan dilakukan kegiatan evaluasi program pada PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP adalah untuk mengevaluasi

proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan program dan tepat sasaran ataukah belum. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dengan menyesuaikan target program dan realisasi program.

Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:6), dijelaskan bahwa metode evaluasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu metode partisipatif dan metode konvensional. Perbedaan yang terdapat pada kedua metode ini yaitu pada metode partisipatif, evaluasi dilakukan oleh masyarakat, staf proyek dan fasilitator, sedangkan pada metode konvensional kegiatan evaluasi dilakukan oleh para ahli eksternal. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode partisipatif karena posisi peneliti adalah sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

Sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:8) peneliti dalam melakukan penelitian evaluasi difasilitasi oleh fasilitator program untuk menentukan indikator keberhasilan yang dapat mencakup output dari suatu proses dengan menggunakan metode sederhana yang disesuaikan dengan kondisi lokal wilayah yang menjadi objek penelitian. Pelaksanaan kegiatan evaluasi berdasarkan metode partisipatif dapat dilaksanakan setiap waktu disesuaikan pada kebutuhan dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dengan memberdayakan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa di dalam penelitian ini mengharuskan peneliti menentukan indikator keberhasilan program yang tetap sesuai dengan ketentuan dalam program. Peneliti juga diperbolehkan menggunakan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi.

Dalam ilmu evaluasi program, ada banyak model evaluasi yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Menurut pendapat Arikunto (2008:40) menyatakan bahwa meskipun antar model evaluasi yang satu dengan yang lain berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang bertujuan untuk menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program yaitu Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stakedan Glaser (Arikunto, 2008:40). Dalam penelitian evaluasi ini peneliti memilih untuk menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Stufflebeam (dalam Tayibnapis, 2000:14) mengartikan evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi-informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Evaluasi dilakukan dengan melihat kepada empat aspek yaitu aspek konteks, aspek input, aspek proses dan aspek produk. Berikut ini merupakan aspek-aspek dalam evaluasi model CIPP:

a. *Context evaluation to serve planning decision/* evaluasi konteks

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program yang akan dilaksanakan. Menurut pendapat Widoyoko (2010:182), evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. Evaluasi konteks menurut Stufflebeam (dalam Tayibnapis, 2000:15) merupakan fokus intitusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Dalam penelitian ini, evaluasi diarahkan pada program PNPM Mandiri Pedesaan bidang kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP). Aspek konteks yang dievaluasi adalah :

- 1) Tujuan program PNPM Mandiri Pedesaan bidang kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).
- 2) Sasaran penerima kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

b. *Input evaluation, structuring decision/ evaluasi Masukan*

Evaluasi masukan merupakan tahap kedua dari model evaluasi CIPP. Maksud dari evaluasi masukan adalah membantu mengatur keputusan, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan serta bagaimana prosedur kerja program untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini evaluasi program dikaitkan dengan kemampuan awal masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menunjang kegiatan SPP, antara lain kemampuan lembaga dalam menyediakan petugas pelaksana kegiatan yang tepat, pengatur dana yang handal, kader pemberdayaan yang berkualitas, dan sebagainya. Indikator input program SPP yang dievaluasi antara lain :

- 1) Fasilitator kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan
- 2) Dana/anggaran untuk program simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

c. *Process evaluation, to serve implementing decisioni / evaluasi proses*

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai (Arikunto, 2008:47). Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator proses program SPP yang dievaluasi adalah :

- 1) Sosialisasi program kepada masyarakat desa
- 2) Pelaksanaan program simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP)
- 3) Partisipasi masyarakat

d. *Product evaluation, to serve recycling decision / evaluasi produk atau hasil*

Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Menurut Tayibnapi (dalam Widoyoko, 2010:183) evaluasi produk diharapkan dapat membantu dalam penetapan keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program.

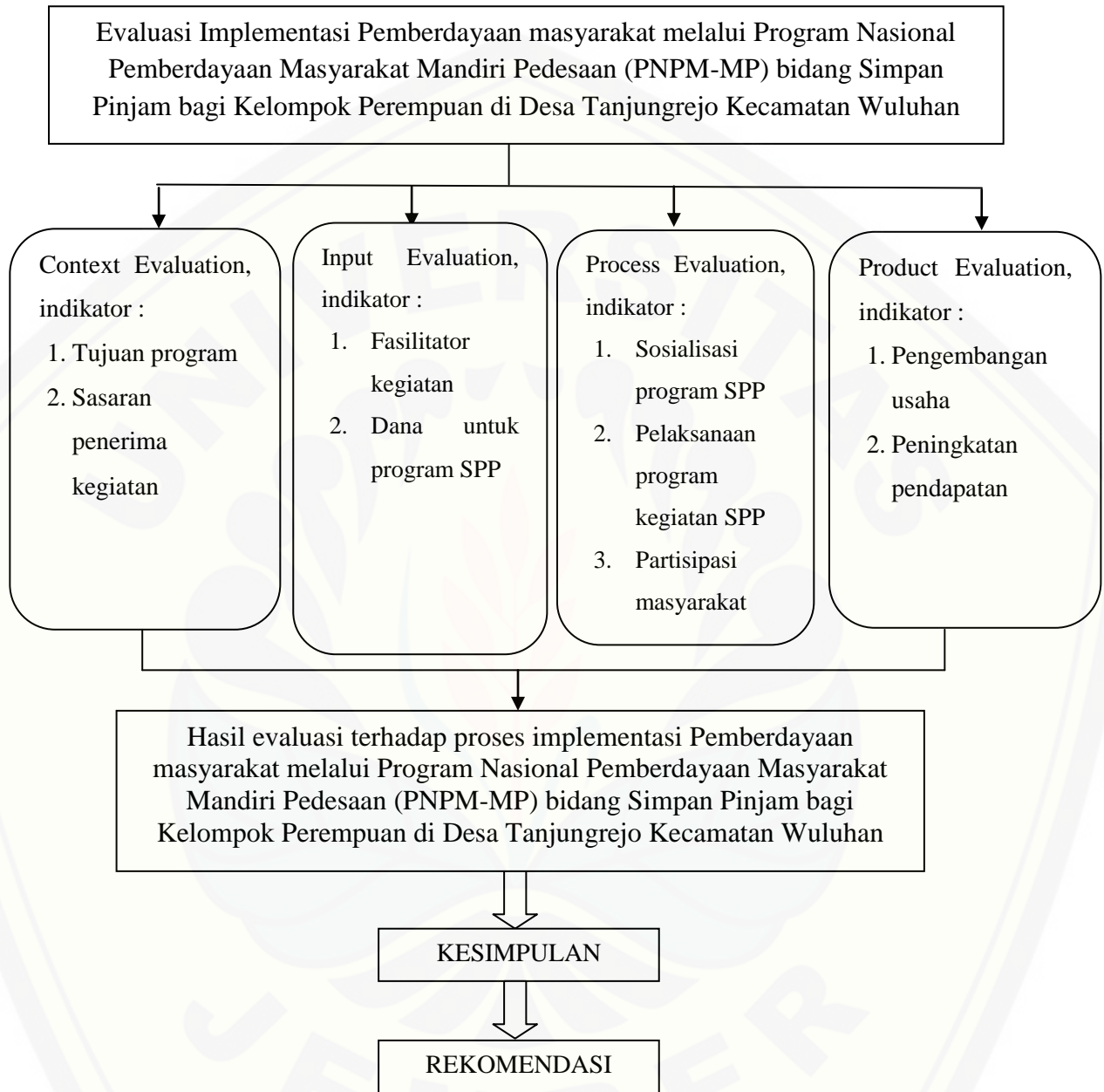
indikator dari keberhasilan program SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan antara lain :

- 1) Pengembangan usaha. Hasil yang diharapkan dari adanya kegiatan SPP tepatnya di Desa Tanjungrejo adalah penerima manfaat yaitu Rumah Tangga Miskin yang produktif dapat mengembangkan usahanya atau dapat membuka usaha dengan pinjaman permodalan yang diberikan UPK dari dana SPP. Sehingga ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga dan dapat mengisi waktunya dengan kegiatan usaha yang produktif.
- 2) Peningkatan pendapatan. Hasil lain yang diharapkan dari kegiatan SPP yaitu terjadi peningkatan pendapatan penerima manfaat kegiatan SPP. Kemudian secara perlahan mereka dapat dengan mandiri meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Peneliti menggunakan metode partisipatif dengan model Evaluasi CIPP dalam penelitian evaluasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini menjelaskan tentang jalannya penelitian tentang Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat digambarkan bahwa evaluasi terhadap proses implementasi suatu program perlu dilakukan seperti halnya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Kegiatan penelitian evaluasi ini dilakukan di Desa Tangjungrejo Kecamatan Wuluhan. Kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan yang digunakan sebagai modal usaha. Tujuan dilakukan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat proses implementasinya, apakah sudah sesuai ketentuan-ketentuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dan bagaimana ketercapaian dari pelaksanaan program.

Untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dilakukan analisis melalui empat aspek yang terdapat dalam model evaluasi CIPP meliputi Context program, input program, process program dan product program. Evaluasi program dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator yang mengacu pada keempat aspek tersebut. Dari langkah-langkah ini, selanjutnya akan didapatkan hasil evaluasi implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tangjungrejo Kecamatan Wuluhan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. metode penelitian merupakan suatu landasan gerak yang memegang peranan penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dijelaskan pada bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, metode penentuan lokasi penelitian, metode penentuan responden, metode pengumpulan data, analisis data dan pengecekan data.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan desain dalam masalah penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Dalam konteks penelitian ini penelitian evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, sudah sesuai dengan ketentuan program dan tepat sasaran atau belum serta untuk mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dengan menyesuaikan target program dan realisasi program.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode partisipatif yang terdapat dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan dengan model evaluasi program yang digunakan adalah *CIPP Evaluation Model*. Secara garis besar, model evaluasi ini terdiri dari empat sasaran evaluasi yaitu *context evaluation*, *input evaluation*, *process evaluation*, *product evaluation*.

3.2 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Metode penentuan lokasi dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive area*, yaitu lokasi penelitian ditentukan atas dasar kesengajaan dan pertimbangan serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, khususnya bagi ibu rumah tangga penerima manfaat kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

Peneliti melakukan penelitian di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dengan pertimbangan pada saat ini Desa Tanjungrejo merupakan desa yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada bidang kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada temuan awal bahwa mayoritas penduduk desa yang belum atau tidak memiliki pekerjaan adalah kaum perempuan.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Subjek penelitian ini adalah seluruh pihak pelaksana program kegiatan SPP. Pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP ini terdiri dari pelaksana ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan di tingkat provinsi dengan jumlah 35 orang.

Dalam subjek Penelitian terdapat *key informant* (informan utama) dan informan tambahan. Metode penentuan *key informan* dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive* yakni informan utama yang ditentukan secara sengaja dengan alasan dapat memberikan informasi yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti terkait pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP). Informan utama dalam penelitian ini adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Fasilitator, petugas UPK dan satuan kerja PNPM Mandiri Pedesaan. Informan utama yang telah ditentukan oleh peneliti sudah mencakup pelaksana kegiatan SPP dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Informan tambahan merupakan orang yang menjadi narasumber informasi yang diharapkan dapat memberikan data atau informasi pendukung dari informasi yang diperoleh peneliti dari *key informan*. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Kriteria ibu rumah tangga tersebut yaitu perempuan yang sudah memiliki usaha ataupun perempuan yang akan membuka usaha dan tentunya tergabung dalam sebuah kelompok perkumpulan khusus perempuan.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung pada pihak pelaksana kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan wuluhan. Data primer yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang kegiatan pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo dan ketercapaian pelaksanaan kegiatan SPP.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait, seperti melalui lembaga atau instansi Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, kantor UPK Kecamatan Wuluhan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pustaka ilmiah lainnya yaitu berupa buku-buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian serta sebagai pelengkap data primer.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

3.5.1 Metode Wawancara

Dalam metode wawancara, peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP). Dalam kegiatan wawancaranya peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan untuk mencari data tentang pelaksanaan kegiatan SPP, target kegiatan SPP, partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan SPP, kondisi kelompok perkumpulan yang mengikuti kegiatan SPP serta dampak adanya program kegiatan SPP bagi masyarakat desa. Proses wawancara menggunakan bentuk wawancara tidak berstruktur, sehingga subjek penelitian dapat leluasa menjabarkan jawabannya.

3.5.2 Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi aktif. Peneliti datang dalam bagian tahapan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan serta datang ke setiap rumah pemanfaat untuk melihat langsung kegiatan usaha penerima manfaat kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo.

3.5.3 Metode Dokumen

Metode dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data-data yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam hal ini berasal dari Kantor Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wuluhan dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS). Data dokumen yang diperoleh meliputi kondisi masyarakat miskin Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, baik mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, jumlah penduduk yang belum bekerja, jumlah kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan simpan pinjam bagi

kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan serta buku petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan.

3.6 Metode Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara melaporkan data dengan memaparkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan data yang terkumpul untuk kemudian disimpulkan. Dalam penelitian ini, data – data mengenai objek penelitian evaluasi ini dibandingkan dengan kriteria-kriteria keberhasilan dari objek yang diteliti yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun kriteria keberhasilan evaluasi implementasi program pemberdayaan pada PNPM Mandiri Pedesaan melalui kegiatan SPP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang SPP

Komponen	Indikator	Skor = 1	Skor = 2	Skor= 3
Konteks	Tujuan program	Belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin	Tujuan program sudah sesuai kebutuhan masyarakat miskin namun sasaran belum diprioritaskan bagi kalangan masyarakat miskin	Tujuan program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan sudah diprioritaskan bagi kalangan masyarakat miskin
	Sasaran penerima manfaat kegiatan SPP	Belum menyentuh kelompok yang termasuk dalam daftar RTM	Sudah menyentuh kelompok yang termasuk dalam daftar RTM namun belum diprioritaskan sebagai sasaran kegiatan	Sudah memprioritaskan kelompok yang termasuk dalam daftar RTM sebagai sasaran kegiatan

Komponen	Indikator	Skor = 1	Skor = 2	Skor= 3
Input	Fasilitator kegiatan SPP	Tingkat pendidikan SMU dan pengalaman menjadi fasilitator kurang dari 3 tahun	Tingkat pendidikan S-1 dan pengalaman menjadi fasilitator kurang dari 3 tahun	Tingkat pendidikan S-1 dan pengalaman menjadi fasilitator lebih dari 5 tahun
	Dana untuk program kegiatan SPP	Dana untuk program kegiatan SPP tidak ada	Dana untuk program kegiatan SPP ada namun tidak mencukupi	Dana untuk program kegiatan SPP ada dan mencukupi
Proses	Sosialisasi program kepada masyarakat desa	Masyarakat desa tidak paham tentang keberadaan kegiatan SPP	Hanya sebagian kecil masyarakat desa yang paham tentang keberadaan kegiatan SPP	Masyarakat desa paham tentang keberadaan kegiatan SPP
	Pelaksanaan program kegiatan SPP	Kegiatan belum sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan	Sebagian besar kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan	Seluruh kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan
	Partisipasi masyarakat	Masyarakat belum aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan SPP	Masyarakat sudah mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan SPP	Masyarakat rutin aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan SPP

Komponen	Indikator	Skor = 1	Skor = 2	Skor= 3
produk	Pengembangan usaha	Usaha belum berkembang	Usaha sudah mulai berjalan dengan baik	Usaha sudah berkembang dengan baik lancar.
	Peningkatan pendapatan	Belum terjadi peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Pendapatan masyarakat sudah meningkat namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka	Pendapatan masyarakat meningkat dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

Sumber : PTO PNPM Mandiri Pedesaan

Setelah menentukan komponen dan indikator keberhasilan Program kegiatan SPP, langkah selanjutnya adalah menentukan *scoring* masing-masing indikator keberhasilan dan menentukan pembobotan, misalnya: skor 3 jika indikator dinilai baik, skor 2 jika indikator dinilai cukup dan skor 1 jika indikator dinilai kurang. Langkah selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan barulah dapat diambil suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data berakhir dan penarikan kesimpulan perlu diverifikasi agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara tinjauan ulang terhadap temuan dilapangan untuk tujuan pemantapan. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana proses implementasi dan bagaimana ketercapaian implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) bidang kegiatan ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

3.7 Pengecekan Data

Untuk menguji kebenaran data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Data yang diperoleh, dicek kebenarannya dengan membandingkan data

yang diperoleh melalui sumber lain. Data yang diperoleh adalah mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan yang kemudian dicek kebenarannya dengan cara dibandingkan dengan informasi dari sumber lain.

Penggunaan teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pengecekan data dengan cara :

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, yakni membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara tidak berstruktur.
2. Membandingkan informasi yang didapat sebelum penelitian dan pada saat penelitian berlangsung.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini, hasil wawancara di lapangan bisa dibandingkan dengan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan, khususnya kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 (empat) ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta pembahasannya. Pembahasan ini telah mengacu pada metode penelitian. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan sebagai berikut.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Tanjungrejo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Desa Tanjungrejo terdiri dari 9 rukun warga dan 103 rukun tetangga. Jarak Desa Tanjungrejo dengan Kecamatan Wuluhan yaitu $\pm 2,5$ km, sedangkan jarak Desa Tanjungrejo dengan Ibu Kota Kabupaten Jember ± 30 km. Batas-batas administratif Desa Tanjungrejo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Glundengan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kesilir dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ampel – Dukuh Dempok.

Desa Tanjungrejo memiliki ketinggian 18 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata harian 29-30°C. Luas wilayah Desa Tanjungrejo sebesar 827,523 ha memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk untuk berbagai kegiatan. Penggunaan luas lahan tersebut terdiri dari tanah sawah 408,648 ha (49,4%), tanah kering seluas 385,988 ha (46,6%) yang terdiri dari lahan untuk pemukiman seluas 293,049 ha dan sisanya lahan perkarangan, serta tanah perkebunan seluas 32,887 ha (4%).

Desa Tanjungrejo terbagi dalam beberapa dusun, yaitu Dusun Grobyog, Dusun Karangsono, Dusun Krajan Kulon dan Dusun Krajan Wetan. Mayoritas penduduk Desa Tanjungrejo merupakan penduduk asli dan sisanya merupakan pendatang dengan sebagian besar penduduknya adalah suku Jawa. Berdasarkan pendataan Profil Desa dan Kelurahan tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjungrejo Tahun 2013

No.	Jenis Kelamin	Distribusi	
		Jumlah Penduduk	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	6.763	48,14
2.	Perempuan	7.285	51,86
	Jumlah	14.048	100

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo tahun 2013

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk yang tidak seimbang dapat disebabkan oleh adanya migrasi, kematian dan kelahiran yang terjadi di Desa Tanjungrejo. Keadaan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan juga memiliki peran dalam mengusahakan perekonomian dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya kegiatan yang dapat memberdayakan para tenaga kerja perempuan di Desa Tanjungrejo walaupun masih dalam skala usaha kecil.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan data penduduk desa tahun 2013, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjungrejo

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
Tidak Tamat Sekolah	4094 jiwa
SD Sederajat	3729 jiwa
SLTP Sederajat	2337 jiwa
SMU Sederajat	1343 jiwa
Diploma	25 jiwa
Sarjana (S1)	52 Jiwa
Pasca Sarjana	4 jiwa
Jumlah	11.584 jiwa

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan penduduk Desa Tanjungrejo masih tergolong rendah. Lebih dari setengah total jumlah penduduk desa tidak tamat sekolah yaitu sebesar 4.094 jiwa (35,34%) dan selanjutnya banyak masyarakat desa yang hanya tamatan Sekolah Dasar yaitu sekitar 3.729 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk yang menempuh tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi hanya 81 jiwa. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kebanyakan setelah tamat SD, mereka diharuskan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Jumlah tenaga kerja Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan data penduduk desa tahun 2013, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja Desa Tanjungrejo

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	3.630	3.202
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak bekerja	590	1.118
Jumlah	4.220	4.320

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tanjungrejo yang termasuk dalam usia kerja sebesar 8.540 jiwa. Penduduk usia 18-56 tahun yang sudah memiliki pekerjaan 6.832 jiwa dan sisanya adalah penduduk yang memasuki usia kerja namun belum atau tidak bekerja. Jumlah penduduk yang memasuki usia kerja namun tidak bekerja didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebesar 1.118 jiwa. Jumlah penduduk perempuan yang tidak bekerja ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga kebanyakan dari mereka hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang merawat keluarganya. Namun dewasa ini, peran ibu rumah tangga bukan hanya merawat keluarga tetapi mereka juga dibutuhkan dalam membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, kaum perempuan Desa Tanjungrejo sangat membutuhkan adanya sebuah keterampilan agar mereka memiliki keahlian dan juga adanya bantuan permodalan untuk mereka membuka atau mengembangkan usaha.

Desa Tanjungrejo dikenal sebagai desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian masyarakat di desa. Pertanian sebagai sektor utama sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan bagi pembangunan perekonomian masyarakat, baik sebagai penyedia bahan pangan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai tingkat pendidikan, keterampilan dan kondisi alam di wilayah tersebut. Kondisi mata pencaharian penduduk Desa Tanjungrejo dapat diklasifikasikan dalam beberapa sektor seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjungrejo

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Prosentase (%)
Petani	5390	69,39
Buruh Tani	1.924	24,77
Pegawai Negeri Sipil	76	0,98
Pengrajin	0	0
Pedagang	425	5,47
Peternak	0	0
Nelayan	2	0,02
Buruh swasta	35	0,45
Dokter	2	0,02
Jumlah	7768	100

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo tahun 2013

Mata pencaharian penduduk Desa Tanjungrejo lebih dominan pada sektor pertanian yaitu sebagai petani maupun buruh tani. Pendapatan dari sektor pertanian ini relatif rendah sehingga menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat desa juga tergolong rendah. Utamanya bagi masyarakat yang bekerja disektor pertanian yang hanya sebagai penggarap sawah atau buruh tani. Keadaan inilah yang menyebabkan jumlah masyarakat miskin di Desa Tanjungrejo masih tinggi.

Klasifikasi masyarakat Desa Tanjungrejo berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Tanjungrejo

Kategori	Jumlah
Keluarga Prasejahtera	1.256 KK
Sejahtera 1	886 KK
Sejahtera 2	819 KK
Sejahtera 3	1.299 KK
Sejahtera 3 plus	462 KK
Jumlah	4.722 KK

Sumber: Wuluhan dalam Angka Tahun 2013

Dari data diatas diketahui bahwa penduduk yang berada dalam kategori keluarga prasejahtera masih mendominasi dalam kondisi tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Tanjungrejo. Tingkat kesejahteraan keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sejahtera jumlahnya berbeda jauh dengan kategori keluarga prasejahtera yaitu 886 KK dengan 1.256 KK. Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjungrejo masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga masih perlu menjadi perhatian khusus bagi Desa Tanjungrejo sendiri.

4.2 Subjek Penelitian

Deskripsi subjek penelitian menjadi salah satu bagian yang penting dalam pembahasan karena untuk mendapatkan gambaran dari subjek penelitian terkait tentang informasi mengenai identitas subjek. Identitas subjek diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menjelaskan masalah yang ada dan juga memberikan kemudahan dalam mencari data yang diinginkan untuk memenuhi tujuan penelitian.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan. Pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP ini terdiri dari pelaksana ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan di tingkat provinsi dengan jumlah 35 orang.

Peneliti dalam penelitian ini menentukan informan utama (*key informant*) yang meliputi satu orang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), satu orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), satu orang dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), satu orang Fasilitator Kecamatan (FK) dan satu orang dari satker

PNPM Mandiri Pedesaan. Mereka ditentukan sebagai informan utama (*key informant*) karena didasarkan pada pertimbangan penguasaan materi permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan permasalahan penelitian. Alasan lain yaitu karena mereka secara langsung terlibat dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

Informan tambahan dalam penelitian ini adalah para penerima manfaat kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Kelompok Petani Perempuan IV merupakan salah satu kelompok perempuan penerima manfaat SPP yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai narasumber informasi pendukung dari informan utama.

4.2.1 Karakteristik Informan Utama

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pembangunan di semua sektor. Tingginya tingkat pendidikan di suatu wilayah mencerminkan seberapa berkembangnya wilayah tersebut, karena biasanya penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah dalam menerima suatu inovasi dan perubahan. Selaras dengan hal itu, tingkat pendidikan pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo tergolong dalam tingkat pendidikan tinggi. Berikut ini adalah data mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh oleh informan utama di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Informan Utama Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
Bu Septi	S1	KPMD
Bapak Faisal	S1	Ketua UPK
Bapak Ali Muchson	S1	PJOK
Bapak Purwanto	S1	Fasilitator kecamatan (FK)
Bapak Anas	S1	Satker PNPM-MP

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan para informan utama mayoritas adalah Sarjana Strata satu. Tingkat pendidikan yang dimiliki informan utama yang merupakan para pihak pelaksana dan terkait langsung dengan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluan sudah dapat dikatakan dalam kategori tingkat pendidikan tinggi.

Mayoritas pendidikan informan utama yang berada pada jenjang pendidikan perguruan tinggi diharapkan dapat memahami setiap tujuan dari adanya program pemerintah untuk upaya mengatasi permasalahan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan yaitu melalui Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) khususnya pada bidang SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluan. Harapan selanjutnya adalah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dalam program serta mampu berpikir rasional dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjungrejo. Hal ini selaras dengan keterangan Bapak Anas saat peneliti melakukan kegiatan wawancara berikut ini:

“...Untuk pelaksana kegiatan PNPM memang minimal S1 mbak demi tercapainya tujuan program nasional ini mbak. Utamanya S1 jurusan ekonomi mbak karena mereka juga dituntut untuk mengajar para ibu-ibu tentang pembukuan sederhana dan pembuatan laporan UPK. Untuk Kader Pemberdayaannya juga ada syarat lain yaitu orangnya memiliki komunikasi yang baik dengan warga desa mbak. Supaya kader bisa memberikan informasi kepada penduduk desa bila ada kegiatan PNPM khususnya bidang kegiatan SPP mbak” (Bapak Anas).

Tugas dan tanggungjawab besar yang diemban oleh para satuan pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang menuntut untuk memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Khusus untuk bidang kegiatan SPP pelaku kegiatan juga dituntut untuk mengajarkan kepada para penerima manfaat mengenai pelaporan dan pembukuan keuangan yang benar. Oleh karena itu, para pelaksana harus memiliki pengetahuan yang lebih dibidang pengelolaan keuangan dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa jabatan masing-masing informan utama yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Ketua UPK, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan (FK) dan Satker PNPM Mandiri Pedesaan. Pelaksana tersebut tidak hanya bekerja di wilayah Desa Tanjungrejo saja, melainkan ada yang ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini dikarenakan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program penanggulangan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja yang bersifat nasional. Mereka semua adalah pelaku kegiatan yang terlibat langsung dalam kegiatan SPP baik sebagai pemandu masyarakat desa dalam serangkaian tahap pelaksanaan kegiatan maupun sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan.

Secara lebih rinci KPMD bertugas untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat desa dalam tiap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP. KPMD terlibat aktif dalam serangkaian kegiatan SPP di desa. Sedangkan UPK bertugas untuk mengelola seluruh dana PNPM Mandiri Pedesaan termasuk juga dana untuk kegiatan SPP di kecamatan. PJOK merupakan seorang kepala seksi (kasi) pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi dengan FK dan tim koordinasi PNPM-MP mengenai pelaksanaan PNPM-MP didaerahnya serta melakukan pengawasan terhadap kinerja UPK.

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan. Sesuai dengan keterangan Fasilitator Kecamatan di Kecamatan Wuluhan yang sempat diwawancarai oleh peneliti berikut ini:

“Tugas saya sebagai FK itu ya melakukan pendamping pada masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Wuluhan mbak, proses pendampingannya itu mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian. Selain itu saya juga bertugas membimbing KPMD dalam melakukan pendampingan di Desanya.”(Bapak Purwanto)

Selanjutnya satker PNPM Mandiri Pedesaan adalah satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Satker PNPM Mandiri Pedesaan ini bertempat di Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). Salah satu tugas pokok dari satker PNPM Mandiri Pedesaan adalah melaksanakan pemeriksaan/audit di setiap wilayah kerja di Kabupaten Jember.

Berdasarkan keterangan di atas, informan utama ini adalah para pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Penentuan informan utama dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan tugas-tugas dari pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan SPP yang mampu memberikan informasi secara tepat.

4.3 Hasil Penelitian

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang juga melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan dari 211 desa yang tersebar di Kabupaten Jember. Program ini secara serentak dilaksanakan pada tahun 2009 di seluruh desa sasaran. Peneliti melaksanakan evaluasi terhadap Program tersebut yang dijalankan di Desa Tanjungrejo dengan menggunakan model evaluasi CIPP, beberapa aspek yang dinilai antara lain:

4.3.1 Aspek Konteks (*context*)

Tahap awal dalam penelitian evaluasi program dengan model CIPP adalah melakukan penilaian terhadap konteks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Berikut adalah beberapa indikator aspek konteks:

a. Tujuan Program

Tujuan dalam suatu program sangat penting terhadap langkah yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut. Tujuan dari suatu program juga memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan yang membutuhkan adanya kegiatan yang mampu memberdayakan mereka, seperti kutipan wawancara dengan KPMD Desa Tanjungrejo berikut ini:

“Banyak ibu-ibu rumahtangga yang kesulitan mendapatkan modal untuk membuka ataupun membangun usaha kecil mbak, karena

penghasilan suami mereka juga rata-rata pas untuk makan saja, tapi ibu-ibu didesa ini takut mbak mau pinjam dibank maklumlah mbak rata-rata kaum wanita disini pendidikannya masih tergolong rendah. Jadi ibu-ibu itu membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pinjaman modal dengan syarat yang tidak terlalu sulit” (Ibu Septi).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Septi, warga Desa Tanjungrejo khususnya kaum perempuan membutuhkan adanya bantuan permodalan yang bisa membuat mereka berwirausaha, menciptakan lapangan kerja sendiri disamping tugas mereka sebagai ibu rumah tangga yaitu merawat keluarganya dan membuat warga perempuan mampu membantu perekonomian keluarga mereka.

Secara umum tujuan dari kegiatan SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014: 58). Tujuan umum dari bidang kegiatan SPP ini tidak keluar dari latar belakang utama PNPM Mandiri Pedesaan, namun kegiatan ini memang hanya khusus untuk memberdayakan kaum perempuan. Seperti keterangan Bapak Anas selaku Satker PNPM Mandiri Pedesaan berikut ini:

“Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan membina masyarakat untuk bisa mandiri. Nah untuk bidang SPP mbak tujuannya lebih khusus untuk membina kaum perempuan untuk bisa ikut berusaha memperbaiki perekonomian keluarga dengan usaha mandiri melalui usaha yang mendapatkan bantuan modal dari SPP mbak” (Bapak Anas).

PJOK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Wuluhan juga menyampaikan hal yang sama, berikut pendapat yang disampaikan Bapak Ali:

“Tujuan dari kegiatan PNPM bidang SPP adalah membuat masyarakat perempuan berdaya dan akhirnya mampu secara mandiri mengatasi permasalahan ekonomi keluarga yang dihadapi mbak melalui bantuan permodalan usaha kecil. Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha karena nanti disetiap akhir tahun UPK

memberikan sejenis pelatihan-pelatihan kepada penerima manfaat” (Bapak Ali).

Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP adalah mengurangi tingkat kemiskinan di desa melalui usaha mandiri masyarakat dengan cara kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan Program ini selain untuk mengurangi jumlah kemiskinan, juga untuk meningkatkan keterampilan warga perempuan desa melalui program-program pembinaan warga dalam berwirausaha. Keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang kegiatan SPP sudah menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan akses bantuan permodalan untuk usaha mikro. Sehingga tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo.

b. Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan SPP

PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP memfokuskan sasarannya pada rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan pendanaan kegiatan usaha. Seperti keterangan ketua UPK Wuluhan saat diwawancarai oleh peneliti berikut ini:

“Sasaran penerima manfaat dari PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP ini mbak adalah masyarakat miskin dan memiliki usaha kecil agar bisa dibina kemudian menjadikan mereka siap mandiri karena lapangan kerja saat ini semakin sulit mbak, apalagi untuk para ibu rumah tangga mbak. Namun kami selaku UPK juga menerima mereka yang bukan termasuk dalam daftar RTM tetapi memiliki usaha mbak, kalo RTM yang ingin punya usaha kami masih belum menerima mbak banyak resiko apalagi kalo kondisinya benar-benar miskin dan punya usaha kecil kami tidak kasi mbak” (Bapak Faisal).

Menurut Bapak Faisal, sasaran utama dari PNPM Mandiri Pedesaan bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) adalah masyarakat miskin yang telah memiliki usaha mikro tetapi tidak menutup kemungkinan juga memberikan kesempatan kepada para masyarakat yang memiliki usaha namun tidak termasuk

dalam kategori rumah tangga miskin. Sedangkan menurut Bapak Anas selaku Satker PNPM Mandiri Pedesaan menambahkan sasaran dari PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP adalah bukan hanya masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha tetapi juga masyarakat miskin yang kemudian sungguh-sungguh ingin mendirikan usaha. Berikut hasil wawancaranya:

“Sasaran dari PNPM Mandiri Pedesaan bukan hanya masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha saja mbak tetapi juga untuk mereka masyarakat miskin yang bersungguh-sungguh ingin membuka usaha tetapi dia kesulitan dalam hal modal mbak. Seharusnya memang RTM yang menjadi prioritas mbak, untuk yang sudah mampu yaa tidak dulu mbak. Karena tujuan utama program ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan di desa dan penyediaan lapangan kerja bagi warga desa mbak. Itu yang tetap harus menjadi penekanan bagi kita sebagai para pelaku program ini” (Bapak Anas).

Hal senada juga disampaikan oleh PJOK Wuluhan Bapak Ali bahwa yang menjadi prioritas sasaran SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang membutuhkan bantuan permodalan. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan PJOK Wuluhan:

“Sasaran utama kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo tetap berpedoman pada petunjuk PNPM Mandiri Pedesaan bahwa yang menjadi sasarannya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang membutuhkan pendanaan sebagai tambahan modal mbak. Kita juga tidak menutup kesempatan untuk mereka yang termasuk dalam RTM yang ingin membuka usaha juga boleh meminjam di SPP mbak” (Bapak Ali).

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga subjek penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran utama yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan bantuan modal untuk kegiatan usaha. Pendapat PJOK Wuluhan juga memberi penekanan bahwa sasaran penerima manfaat yang telah disampaikan terdapat dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Dirasa memang lebih tepat bila sasaran penerima manfaat kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin produktif dan rumah tangga miskin yang benar-benar ingin membuka

usaha daripada penerima manfaat yang merupakan masyarakat yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin tetapi mereka memiliki usaha. Hal ini dikarenakan tujuan utama adanya PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di tingkat desa melalui kegiatan yang bisa membuat masyarakat desa berdaya dan akhirnya secara mandiri bisa mengusahakan kesejahteraan hidup bagi keluarga mereka.

Menyikapi perbedaan persepsi diantara pelaku kegiatan SPP terkait dengan sasaran yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP ini lebih baik jika pelaksana tetap berpedoman pada PTO PNPM Mandiri Pedesaan. Calon pemanfaat yang latar belakang keluarganya bisa dikategorikan dalam keluarga mampu lebih baik tidak didahulukan terlebih dulu. Memang dari segi perguliran dana jika bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar miskin terdapat dilema terhadap pelestarian kegiatannya, karena ditakutkan jika diberikan kepada warga yang benar-benar miskin akan terjadi ketidaklancaran dalam proses pengembaliannya dan hal tersebut dapat mengganggu kegiatan selanjutnya. Namun kekhawatiran tersebut masih dapat disiasati dengan memberikan pendampingan kepada calon pemanfaat yang merupakan warga miskin melalui pelatihan-pelatihan terkait usaha ekonomi produktif. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan tidak memberikan pinjaman modal dalam jumlah banyak bagi masyarakat yang kondisinya benar-benar miskin dan usahanya belum lama dikembangkan.

4.3.2 Aspek Masukan (*Input*)

Tahap kedua dalam evaluasi dengan model CIPP adalah penilaian terhadap aspek masukan (input) PNPM Mandiri Pedesaan Bidang SPP. Beberapa indikator yang dinilai berikut ini:

a. Fasilitator Kegiatan SPP

Fasilitator merupakan pendamping masyarakat yang bertugas memfasilitasi dalam setiap proses tahapan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian program. Pihak pelaksana kegiatan program yang

merupakan informan utama dalam penelitian ini adalah fasilitator kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Tugas fasilitator disini sangat besar dan memiliki tanggungjawab yang berat karena berkaitan dengan kesuksesan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu seorang fasilitator kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki pengalaman menjadi fasilitator dan memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat. Seperti pendapat Bapak Anas ketika diwawancarai oleh peneliti berikut ini:

“Untuk menjadi Fasilitator kegiatan SPP baik untuk PJOK maupun FK mbak minimal lulusan S-1 dan yang diutamakan jurusan ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan untuk S-1 jurusan lain mbak. Yang pasti minimal lulusan S-1. Selain itu mbak untuk menjadi PJOK ataupun FK harus memiliki pengalaman menjadi fasilitator, dikatakan baik jika sudah memiliki pengalaman diatas 5 tahun mbak, kalau 3 tahun itu kategori cukup baik mbak. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan mbak, kalau pengetahuannya semakin tinggi akan semakin mudah menarik simpati masyarakat. Dan untuk Kecamatan Wuluhan sudah memenuhi kualifikasi semua mbak” (Bapak Anas).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anas selaku satker PNPM Mandiri Pedesaan dapat diketahui bahwa kualifikasi untuk menjadi fasilitator kegiatan SPP baik PJOK maupun Fasilitator Kecamatan (FK) harus memiliki pendidikan minimal lulusan S-1 dan diutamakan dari jurusan ekonomi namun tidak menutup kemungkinan lulusan S-1 dari jurusan lain. Selain itu, PJOK dan Fasilitator Kecamatan juga harus memiliki pengalaman menjadi fasilitator dalam program lain. Pengalaman menjadi fasilitator dikatakan baik jika sudah memiliki pengalaman lebih dari lima tahun, dikatakan memiliki pengalaman cukup baik jika sudah memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun dan pengalaman dinilai kurang baik jika pengalaman yang dimiliki menjadi fasilitator kurang dari tiga tahun.

Para fasilitator kegiatan SPP juga dituntut memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat. Pengetahuan tentang kegiatan ini sangat diperlukan, mengingat program kegiatan akan disampaikan oleh fasilitator PNPM Mandiri

Pedesaan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki, akan semakin mudah menarik simpati masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan PNPM Mandiri di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Peneliti selanjutnya mewawancarai Fasilitator Kecamatan (FK) Wuluhan untuk memastikan pernyataan Bapak Anas dan untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai Bapak Purwanto selaku FK Wuluhan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Purwanto:

“Saya dulu lulusan S-1 pendidikan agama mbak. Saya bisa menjadi FK PNPM Mandiri Pedesaan ini dengan ikut tes seleksi FK di Propinsi waktu itu mbak. Sebelumnya memang saya sering mengikuti program-program kegiatan yang ada di desa saya mbak, ikut-ikutan sosialisasi gitu mbak kan bapak saya kebetulan juga perangkat desa mbak. Kalo berkecimpung diprogram desa sudah lebih dari lima tahun mbak dan saya sudah menjadi FK sejak tahun 2009 awal program ini diluncurkan mbak. Pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat saya rasa lebih tepat mbak, daripada program BLT atau Raskin itu mbak” (Bapak Purwanto).

Setelah mendapatkan informasi dari Bapak Purwanto, peneliti juga mewawancarai Bapak Ali selaku PJOK Kecamatan Wuluhan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Ali:

“Saya lulusan S-1 Sospol mbak. Saya sejak umur 40 tahun sudah mulai bergelut di Kecamatan Wuluhan mbak. Sudah banyak sekali program-program pemerintah yang saya terlibat didalamnya, sampai akhirnya saya dipercaya oleh kabupaten untuk menjadi PJOK di Program PNPM Mandiri Pedesaan mbak. Saya lebih suka program pengentasan kemiskinan yang seperti program ini mbak, karena masyarakat itu terlibat aktif tidak hanya mereka langsung menerima bantuan uang saja mbak, sehingga masyarakat dapat secara mandiri berusaha meningkatkan taraf hidupnya bersama keluarganya. Semoga akan ada program-program seperti ini dari pemerintah mbak. Untuk UPK dan KPMD juga dituntut memiliki kualifikasi itu mbak tetapi yang menetapkan itu atas dasar hasil rapat MAD mbak” (Bapak Ali).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan utama tersebut mengenai fasilitator kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan dapat diketahui bahwa yang telah disampaikan oleh satker PNPM Mandiri Pedesaan terkait dengan kualifikasi yang

harus dimiliki oleh fasilitator program ini dan kondisi fasilitator di Kecamatan Wuluhan yaitu untuk PJOK dan FK memang sudah dikatakan termasuk dalam kategori baik. Karena keduanya juga memiliki pendidikan yang tinggi, pengalaman menjadi fasilitator dalam program lain lebih dari lima tahun dan pengetahuan tentang konsep pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah baik.

Selanjutnya untuk UPK dan KPMD juga diharuskan memiliki kualifikasi terkait pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang sama dengan PJOK dan UPK. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Faisal selaku ketua UPK Wuluhan:

“Saya Lulusan S-1 jurusan ekonomi mbak. Saya ikut-ikutan kegiatan didesa untuk menangani program pemerintah itu sejak saya kuliah semester lima mbak, jadi kalo dihitung-hitung pengalaman yang saya miliki sebelum menjadi ketua UPK ini sekitar empat tahunan mbak. Berdasarkan dari pengalaman ikut terjun dikegiatan desa itu mbak kurang lebihnya saya tahu program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, seperti PPK dan kegiatan pemberdayaan dari anak-anak kuliah.” (Bapak Faisal).

Hal senada juga disampaikan oleh KPMD Desa Tanjungrejo yaitu Ibu Septi berikut ini :

“Saya dulu sebelum terpilih menjadi Kader PNPM Mandiri Pedesaan ditawari terlebih dulu mbak, kata Bapak Kades karena saya sudah lama berkecimpung dalam pendataan masyarakat desa sehingga saya lebih paham betul kondisi masyarakat itu bagaimana mana mbak” (Ibu Septi).

Menurut beberapa pernyataan dari fasilitator kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Wuluhan, diperoleh data bahwa mereka sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh dinas yang menangani PNPM Mandiri Pedesaan. Apalagi memang program ini merupakan program yang bersifat nasional yang menuntut tanggungjawab penuh dari para pelaksana di lapangan, sehingga sudah sepantasnya bila yang terpilih untuk memfasilitasi masyarakat walaupun hanya setingkat desa adalah mereka yang memenuhi syarat yang paling baik.

b. Dana untuk Program Kegiatan SPP

Dana untuk kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan sangat penting khususnya bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP), karena tanpa menggunakan dana suatu kegiatan tidak akan berjalan maksimal dan sulit mencapai tujuan dari program. Apalagi untuk program kegiatan SPP dana menjadi sangat utama karena kegiatan ini merupakan kegiatan simpan pinjam, jadi kegiatan tidak akan berjalan sesuai rencana bila dana untuk kegiatan simpan pinjam tidak ada. Penilaian terhadap dana meliputi besarnya anggaran yang didapat dalam program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Dana dinilai tinggi apabila ada dan mencukupi kebutuhan kegiatan, dana dinilai sedang apabila ada tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan kegiatan dan dana dinilai rendah apabila dana untuk pelaksanaan kegiatan tidak ada. Dari hasil wawancara dengan Ketua UPK, dana untuk kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan sudah disiapkan sesuai dengan anggaran pemerintah. Dana berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Jember.

“Dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Wuluhan berasal dari dua sumber yaitu APBN sebesar 30% dari setiap dana yang dicairkan dan APBD sebesar 20%, dari total anggaran dana tersebut mbak sebesar 25% adalah untuk kegiatan SPP. Sejak tahun 2009 hingga saat ini mbak dana untuk SPP berkembang menjadi Rp 2.132.500.000,-. Nanti untuk pencairan dilakukan secara bergiliran mbak gag semua kelompok, tergantung kelompok yang mengajukan proposal. Diawal pinjaman hanya Rp 1.000.000 per orang mbak, kemudian bertambah Rp 1.500.000,- dan berikutnya hingga sekarang pinjaman maksimal sebesar Rp 2.000.000 per orang mbak” (Bapak Faisal).

Dana dirasa sudah mencukupi dan kegiatan PNPM Mandiri bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan diharapkan bisa berjalan dengan baik, walaupun dana tersebut masih harus dibagi untuk 7 dusun yang ada di Kecamatan Wuluhan. Namun nantinya perguliran dana kepada masyarakat juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti pada tahun awal pelaksanaan setiap penerima manfaat hanya menerima pinjaman modal sebesar Rp 1.000.000,- kemudian untuk tahun

berikutnya pinjaman bisa naik menjadi Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan anggaran dana yang ada di UPK untuk setiap tahunnya juga mendapatkan tambahan 25% dari dana BLM yang diberikan pemerintah dari APBN dan APBD dan juga penambahan balas jasa/bunga yang diperoleh dari penerima manfaat sebesar 1,5%.

4.3.3 Aspek Proses (*Process*)

Penilaian terhadap proses pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP meliputi penilaian pada tahap sosialisasi, pelaksanaan kegiatan SPP sampai dengan partisipasi masyarakat desa yang menjadi subjek pelaksanaan program tersebut.

a. Sosialisasi Program kepada Masyarakat Desa

Kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan merupakan suatu usaha untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) kepada masyarakat desa. Harapan dengan adanya kegiatan sosialisasi masyarakat itu bisa memahami apa tujuan, bagaimana prosedurnya dan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan yaitu rumah tangga miskin dan para pelaku program.

Kegiatan sosialisasi SPP dapat dilakukan dalam waktu yang fleksibel bisa dilakukan dalam kegiatan yang khusus dibuat oleh program maupun kegiatan lain yang terdapat di setiap lokasi program ini. Seperti yang diungkapkan oleh Satker PNPM Mandiri Pedesaan, Bapak Anas berikut ini :

“Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan memang harus dilaksanakan secara berkelanjutan mbak, minimal setahun sekali mbak. Karena penting sekali membentuk pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya program ini mbak” (Bapak Anas).

Berbeda dengan pernyataan Bapak Anas, PJOK Kecamatan Wuluhan Bapak Ali menyatakan bahwa sosialisasi di seluruh desa yang ada di Kecamatan Wuluhan

termasuk Desa Tanjungrejo dilakukan selama tiga tahun sebelumnya hanya masyarakat yang menyampaikan informasi dari mulut ke mulut. Beliau menganggap bahwa masyarakat sudah memahami informasi tentang PNPM Mandiri Pedesaan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ali :

“Awalnya KPMD melakukan pendekatan pada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti kelompok PKK, jamaah tiba`an, kelompok yasinan, dasa wisma, kelompok RT/RW kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi di kantor desa mbak. Kegiatan sosialisasi dilakukan dari tahun 2009,2010,2011 saja mbak. Karena masyarakat sudah paham kalau ada program SPP sehingga mereka bisa menyampaikan pada tetangga-tetangganya kalau ada kegiatan SPP dari PNPM Mandiri Pedesaan mbak. Kita menilai dari jumlah masyarakat yang semakin banyak untuk ikut.” (Bapak Ali).

Dari penjelasan tersebut, kiranya dapat diasumsikan bahwa para pelaksana kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Wuluhan hanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat selama tiga tahun saja yaitu sejak tahun pertama program tersebut dilaksanakan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa masyarakat sudah banyak yang mengetahui kegiatan SPP, keadaan ini dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengajukan pinjaman modal melalui kelompok kepada UPK.

Namun pernyataan berbeda dengan anggota kelompok SPP ketika diwawancarai oleh peneliti. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Senimah:

“Saya jujur saja tidak tahu mbak apa itu program SPP yang ditanyakan oleh mbak, saya itu ikut kelompok diajak Ibu Septi mbak. Tapi tidak tau itu program apa. Saya juga tidak pernah diberitahu untuk datang kumpulan di balai desa itu mbak. Pokoknya saya hanya diberitahu ada pinjaman untuk modal usaha bunganya 2%” (Ibu Senimah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu membuat masyarakat paham dan mengerti tentang tujuan keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan. Walaupun

jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan SPP semakin banyak namun mereka semua banyak yang belum mengetahui pasti bagaimana tujuan dan prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Pihak pelaksana kegiatan program ini juga harus tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang PNPM Mandiri Pedesaan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui ketentuan tentang program ini. Mengingat PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional yang masyarakat juga diperbolehkan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam setiap program.

b. Pelaksanaan Program Kegiatan SPP

Salah satu indikator keberhasilan dalam evaluasi proses adalah kegiatan pelaksanaan program yang diteliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Bentuk fasilitas PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP adalah menitikberatkan pada peminjaman dan penyediaan modal melalui penyaluran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada Kelompok SPP. UPK Kecamatan Wuluhan merupakan kelembagaan simpan pinjam pengelola PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan terdiri dari:

1. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah Desa dan MKP merupakan tahapan seleksi di tingkat desa yang kegiatannya menetapkan usulan desa untuk kegiatan SPP. Sebelum musyawarah desa dilakukan maka terlebih dulu dilakukan musyawarah khusus perempuan (MKP). MKP merupakan pertemuan ditingkat desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan yang berasal dari kelompok-kelompok perempuan. Tujuan MKP yaitu untuk menentukan usulan kegiatan simpan pinjam dan memilih wakil untuk hadir dalam MAD Prioritas Usulan. Setelah MKP dilakukan, kemudian dilakukan Musyawarah desa untuk memusyawarahkan lagi hasil MKP dihadiri oleh wakil MKP dan wakil masyarakat lain. Dalam penulisan usulan kelompok merupakan tahapan program yang menghasilkan proposal kelompok yang kemudian akan

diverifikasi apakah seluruh kelompok yang mengajukan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dari SPP.

Penulisan usulan kelompok SPP paling tidak harus memuat beberapa hal berikut ini: sekilas kondisi kelompok SPP; gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang serta perhitungan rencana kebutuhan dana; dan daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin. berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPK:

“sebelum proposal diajukan di UPK mbak, memang terlebih dulu dimusyawarahkan dipilih wakil yang akan datang dalam MAD Prioritas Usulan mbak, selanjutnya diserahkan ke kantor UPK mbak. Kemudian dilakukan verifikasi di desa masing-masing untuk menentukan kelayakan kelompok yang mengajukan pinjaman mbak.”(Bapak Faisal).

Berdasarkan pernyataan Bapak Faisal selaku ketua UPK terkait tahapan awal pelaksanaan kegiatan SPP memang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok SPP. Kegiatan yang lebih dulu dilakukan sebelum proses verifikasi adalah tahapan musyawarah desa dan MKP yang sudah menghasilkan proposal kelompok untuk mengajukan pinjaman modal ke SPP.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan SPP setelah proposal pengajuan pinjaman dana diterima oleh pihak UPK. Berkas proposal yang masuk ke UPK diperiksa kebenaran dan kelengkapannya. Hal-hal yang diverifikasi meliputi : pengalaman kegiatan simpan pinjam, persyaratan kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam, penilaian khusus rencana kegiatan, penilaian kategorisasi kelompok serta yang paling utama adalah jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin yang ada di Desa Tanjungrejo

Kecamatan Wuluhan. Seperti kutipan hasil wawancara peneliti dengan ketua UPK, berikut ini:

“Kegiatan verifikasi ini rutin dilakukan mbak sebelum adanya penetapan kelompok mana yang mendapatkan pinjaman. Kegiatan ini dilakukan perdesa mbak dikantor desa tempatnya. Rata-rata kalo kelengkapan proposal setiap kelompok sudah lengkap itu semua kelompok lolos verifikasi mbak.” (Bapak Faisal).

Berdasarkan penjelasan dari ketua UPK bahwa kegiatan verifikasi dilakukan secara rutin setelah semua berkas proposal pengajuan pinjaman SPP telah masuk ke UPK. Kegiatan verifikasi dilakukan di desa masing-masing. Umumnya berkas proposal yang telah lengkap semua kemungkinan besar akan mendapatkan pinjaman dari SPP. Apabila terdapat berkas yang belum lengkap atau salah maka kelompok bisa mengajukan proposal kembali untuk mendapatkan pinjaman periode selanjutnya. Verifikasi selama tahun 2009-2014 dilakukan setiap 10 bulan sekali.

3. MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan merupakan pertemuan di kecamatan yang bertujuan untuk membahas dan menyusun peringkat usulan. Tahapan ini merupakan tahap evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas seharusnya ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon peminfaat kategori rumah tangga miskin. Hasil dari prioritas ini menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga dapat ditentukan kelompok yang layak untuk didanai oleh BLM. Tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan.

Calon peminfaat rumah tangga miskin lebih diprioritaskan dalam kegiatan ini, namun dalam pelaksanaan kegiatan SPP di lapangan prosesnya tidak seperti itu. Terdapat banyak penerima manfaat yang bukan dari kategori rumah tangga miskin. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan Wuluhan berikut ini:

“ya mbak yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP ini bukan hanya masyarakat RTM saja melainkan mereka yang bukan termasuk

dalam kondisi rumah tangga miskinpun boleh meminjam disini, asalkan mereka bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu mbak dan ada usaha yang didanai mbak. Sebab kalo miskin-miskin banget ya resiko tidak bisa mengembalikan pinjaman mbak. Daripada menanggung resiko seperti itu mbak, ini semua juga demi kelancaran kegiatan ini mbak” (Bapak Faisal).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Septi selaku KPMD yang merupakan pelaksana kegiatan SPP yang paling dekat dan lebih mengetahui kondisi masyarakat di Desa Tanjungrejo. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau:

“Dalam ketentuan memang sasaran SPP adalah RTM yang produktif mbak tetapi tidak semua RTM itu punya usaha mbak, jadi bagi mereka yang ingin meminjam walau mereka bukan termasuk RTM juga tidak apa-apa mbak, yang penting mereka bisa membayar tepat waktu to mbak?? Mungkin mereka juga membutuhkan bantuan karena ada kebutuhan yang mendesak. Walau mereka bukan RTM tapi mereka punya usaha yang dapat didanai mbak” (Ibu Septi).

Menurut pendapat pelaksana kegiatan SPP baik ketua UPK maupun KPMD, keduanya menyampaikan hal yang sama bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan bukan hanya RTM saja yang bisa menjadi penerima manfaat kegiatan SPP, melainkan mereka yang tidak termasuk dalam kategori RTM juga bisa menjadi penerima manfaat kegiatan ini asalkan mereka memiliki usaha mikro yang didanai. Pelaksana kegiatan SPP beranggapan bahwa jika yang diberikan pinjaman adalah orang yang benar-benar miskin, itu akan memberikan resiko yang besar bagi keuangan UPK. Resiko yang ditanggung adalah masyarakat yang diberikan pinjaman tidak memiliki kekuatan untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulan.

Pernyataan bahwa semua anggota SPP mempunyai usaha yang dikembangkan ternyata kurang tepat. Terdapat beberapa anggota dari kelompok SPP yang tidak memiliki usaha, keadaan ini diketahui peneliti ketika melakukan observasi langsung ke rumah setiap anggota dari salah satu kelompok SPP dan juga melaksanakan wawancara mendalam. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dariyanik.

“Begini mbak sebenarnya saya tidak mempunyai usaha, modal pinjaman saya gunakan untuk membantu suami menggarap sawah, biasanya digunakan untuk membeli pupuk dan kebutuhan sehari-harinya. Tapi juga banyak kok mbak yang lain juga tidak punya usaha, yang penting bayar angsuran tidak pernah telat. Itu teman saya satu kelompok Ibu Insiyah juga tidak punya usaha mbak” (Ibu Dariyanik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana kegiatan SPP dan penerima manfaat anggota SPP dapat diketahui bahwa tidak semua yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP adalah masyarakat miskin. Tidak semua anggota kelompok SPP juga mempunyai usaha yang dikembangkan seperti yang tercantum dalam proposal peminjaman dana dari SPP. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan SPP sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan. Pelaksana kegiatan juga perlu melaksanakan survei usaha anggota kelompok SPP untuk melihat bagaimana perkembangan usaha anggota dan memastikan benar atau tidak ada usaha yang dikembangkan.

4. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup tentang ketentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing dan perhitungan jasa pinjaman baik itu jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan dan jadwal angsuran dana BLM. Penetapan persyaratan ini dibuat dengan memperhatikan kemampuan masyarakat desa, adanya persyaratan ini bukan untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses permodalan di SPP. Seperti pernyataan Bapak Anas ketika diwawancarai oleh peneliti.

“Jasa pinjaman untuk SPP diseluruh kabupaten Jember itu sebesar 1,5% mbak. Bunga yang dibebankan lebih ringan dari bunga pinjaman yang berlaku di lembaga keuangan yang biasanya 3% mbak. Masyarakat juga tidak dikenakan agunan. Dan untuk jadwal angsuran itu maksimal dilakukan dalam 12 bulan mbak. Intinya penetapan persyaratan tetap berdasar pada ketentuan SPP mbak” (Bapak Anas).

Kenyataan yang berbeda terdapat dalam pelaksanaan SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat dalam SPP ini dibebani balas jasa sebesar 2%. Seperti kutipan wawancara peneliti dengan Ibu Septi KPMD Desa Tanjungrejo dan juga merangkap jabatan :

“...Ya mbak anggota SPP disini dibebani bunga 2% pada saat pencairan dananya. Namun yang masuk di UPK tetap 1,5% mbak, sisanya yang 0,5% itu dana kesejahteraan kelompok mbak. Yah kadang uang itu digunakan untuk transportasi ketua kelompok mengurus pinjaman ataupun untuk kebutuhan fotocopi proposal mbak” (Ibu Septi).

Melihat pendapat yang berbeda terkait dengan pelaksanaan SPP di Desa Tanjungrejo sangat disayangkan. Sebab 0,5% bagi masyarakat miskin sangatlah berarti, apalagi uang pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Seharusnya pelaksanaan di desa tetap dengan bunga 1,5% saja, sedangkan untuk biaya-biaya lain seperti transportasi ataupun fotocopy proposal bisa dilakukan dengan meminta anggota kelompok untuk membayar iuran, misalnya iuran sebesar Rp 5.000,- pada saat pencairan dana. Selisih bunga 0,5% ditakutkan muncul kecenderungan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, apalagi mereka yang menjadi anggota rata-rata hanya berpendidikan SD ataupun SMP.

5. Penetapan Daftar Tunggu

Penetapan daftar tunggu terjadi apabila terdapat usulan kegiatan kelompok SPP yang belum didanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak tetap dapat didanai oleh dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu kelompok ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. Pelaksanaan perguliran di Kecamatan Wuluhan termasuk Desa Tanjungrejo tidak pernah ada kelompok yang sudah layak didanai

oleh BLM tetapi kelompok itu harus masuk dalam daftar tunggu. Seperti hasil wawancara dengan ketua UPK berikut ini:

“Untungnya di Desa Tanjungrejo tidak pernah ada kelompok spp yang sampai masuk daftar tunggu mbak. Dana yang ada memang cukup untuk mencairkan pinjaman masyarakat mbak. Tetapi ya gitu mbak jumlah besaran pinjaman juga tidak banyak, tahun 2009 saja hanya Rp 1.000.000,- setiap anggota, tahun selanjutnya meningkat lagi mbak”(Bapak Faisal).

Berdasarkan pernyataan Ketua UPK diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang ada di UPK untuk kegiatan SPP memang mencukupi untuk kegiatan peminjaman bagi kelompok SPP sehingga tidak pernah ada kelompok SPP yang layak mendapatkan pendanaan sampai masuk dalam daftar tunggu. Peminjaman yang diberikan kepada anggota kelompok SPP juga jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dana yang ada. Seperti yang terjadi pada tahun 2009 setiap anggota kelompok SPP mendapatkan pinjaman Rp 1.000.000,-, tahun 2010 pinjaman naik menjadi Rp 1.500.000,- setiap anggota dan sampai saat ini pinjaman untuk setiap orang maksimal Rp 2.000.000,-. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya kecamatan mendapatkan dana dari APBN dan APBD, dimana 25% dari total dana yang didapat merupakan bagian dari bidang kegiatan SPP dan ditambah lagi hasil balas jasa atau bunga 1,5% dari angsuran tiap kelompok.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tercapainya tujuan program PNPM Mandiri Pedesaan, karena dalam setiap kegiatan program membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat dalam program ini tidak lagi sebagai objek pelaksanaan program yang hanya tinggal menerima bantuan, akan tetapi masyarakat menjadi subjek pelaksanaan kegiatan yang juga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan suatu program yang dijalankan. Program ini selain ingin memberikan bantuan pada masyarakat miskin tetapi juga ingin menjadikan masyarakat mandiri dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya dan penyelesaian masalah ekonomi yang

dihadapi, sehingga tidak hanya berharap bantuan dari pemerintah ketika ada kesulitan namun melalui tangan mereka sendiri mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dalam setiap pertemuan untuk PNPM Mandiri Pedesaan sangat aktif dan masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan SPP. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Septi yang merupakan KMPD Desa Tanjungrejo.

“Warga desa tanjungrejo itu sangat antusias mbak dengan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, bukan hanya warga laki-laki saja mbak, ibu-ibunya juga tidak mau ketinggalan. Kan ada program yang khusus untuk perempuan itu mbak yang namanya SPP itu mbak, setiap ada pertemuan juga datang mbak. Dan kelompok yang ikut SPP dulu tahun 2009 hanya 9 kelompok saja mbak sekarang jadi 122 kelompok mbak. Setiap verifikasi juga pasti datang semua mbak. Dalam membayar angsuranpun selalu tepat waktu mbak” (Ibu Septi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septi dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan sangat tinggi. Mereka antusias mengikuti setiap tahapan proses kegiatan SPP, misalnya pada kegiatan verifikasi semua anggota kelompok yang mengajukan proposal peminjaman modal dari SPP datang tanpa ada yang absen.

Bentuk partisipasi lain dari masyarakat secara nyata juga ditunjukkan dengan sikap tertib dan disiplin dalam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini mencerminkan tanggungjawab mereka sebagai anggota kelompok SPP, tanpa harus ada unsur pemaksaan mereka sudah memahami tanggungjawabnya sebagai anggota. Demi kelancaran proses pencairan dana masyarakat berusaha kooperatif dengan tim UPK, KPMD, FK maupun PJOK yang semuanya merupakan pelaksana kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Istiqomah salah satu penerima manfaat kegiatan SPP. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Saya sudah lima kali berturut-turut mbak mengikuti kegiatan SPP ini walaupun ada beberapa dari kita yang tidak mengetahui kegiatan sosialisasi dibalai desa mbak tapi jika diberitahu pasti ibu-ibu datang mbak dan alhamdulillah juga saya tidak pernah telat membayar angsuran

mbak. kegiatan ini sudah bagus mbak, tetapi kenapa tidak ada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti menyulam, membuat tas, membuat kue, dll mbak? biar ibu-ibu disini memiliki keterampilan mbak, pasti banyak yang ikut mbak. kita sudah sering meminta tapi belum diadakan mbak ” (Ibu Istiqomah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tanjungrejo yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP menunjukkan keinginan masyarakat agar kegiatan lebih inovatif lagi. Masyarakat menginginkan agar mereka juga bisa mengikuti kegiatan pelatihan melalui kegiatan SPP ini, sehingga mereka lebih memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka atau untuk membuka usaha baru dari bantuan modal yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP sangat tinggi. Masyarakat aktif mengikuti tahapan kegiatan SPP, disiplin dan tepat waktu dalam membayar angsuran pinjaman kepada UPK dan masyarakat juga memiliki keinginan agar pelaksana kegiatan SPP mengadakan kegiatan pelatihan untuk menambah keterampilan masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo. Namun keinginan masyarakat ini memang belum direalisasikan oleh pihak pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan.

Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP dilihat dari aspek proses menunjukkan hasil yang berbanding terbalik antara sosialisasi dan pelaksanaan program kegiatan SPP dengan partisipasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan SPP menunjukkan hasil yang kurang baik, namun partisipasi masyarakat tinggi. Hal ini dilihat dari segi masyarakat yang mengikuti kegiatan SPP dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlah penerima masyarakat, kehadiran masyarakat penerima manfaat SPP dalam setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk kegiatan pengajuan SPP, kedisiplinan penerima manfaat yang ditunjukkan dari ketepatan waktu dalam pembayaran angsuran SPP serta keinginan masyarakat agar kegiatan SPP juga lebih variatif misalnya ada kegiatan pelatihan untuk masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo. Walaupun kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat belum mengerti maksud dan tujuan

dilaksanakannya PNPM Mandiri Pedesaan, namun masyarakat Desa Tanjungrejo menerima dengan respon positif adanya program ini dan mereka ikut aktif berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP dengan pengetahuan dan pemahaman mereka yang terbatas tentang PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP.

4.3.4 Aspek Produk (*Product*)

Tahap keempat dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian terhadap hasil serta menganalisa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan atau belum. Dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ingin dicapai adalah untuk mendorong pengurangan rumah tangga miskin melalui pengembangan usaha mikro dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan kegiatan PNPM Mandiri pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP), peneliti melakukan wawancara dan observasi keberadaan usaha masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

a. Pengembangan Usaha

Salah satu indikator dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan untuk melihat kondisi perempuan yang meminjam dana BLM melalui SPP dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dikembangkan. Untuk menilai kemampuan wirausaha kaum perempuan Desa Tanjungrejo dapat dilihat dari besarnya antusiasme para ibu-ibu rumah tangga melalui kelompok perkumpulan meminjam modal untuk kegiatan usaha mikro yang dikembangkannya dan mengelolanya dengan baik. Semakin besar persentase perkembangan usaha kelompok SPP maka diasumsikan semakin berhasil dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga anggota kelompok SPP yang bersangkutan.

Adanya dana SPP yang dapat dipinjam oleh kaum perempuan anggota kelompok SPP sudah membuat mereka yang bersangkutan mampu mengembangkan usahanya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan FK Wuluhan berikut ini:

“Untuk anggota SPP yang memang benar-benar menggunakan uang dari SPP untuk usaha rata-rata usahanya bisa berkembang mbak. Misal ibu-ibu yang memiliki usaha mlijo barang dagangannya sebelum mendapatkan bantuan hanya sayuran dan lauk tahu tempe gitu aja mbak, setelah mendapat bantuan modal SPP mampu menambah barang-barang yang dijualnya mungkin bisa sekarang menambah jualan daging, ikan maupun jumlah dagangannya yang dulu sudah ada semakin banyak” (Bapak Purwanto).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ali selaku PJOK Kecamatan Wuluhan, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Perkembangan usaha tiap pemanfaat sudah meningkat walaupun persentasenya tidak banyak mbak. Rata-rata usaha mereka masih sangat kecil mbak, seperti usaha warung barang-barang yang dijual macamnya jadi banyak mbak, terus pengrajin bisa menambah bahan bakunya kemudian produksinya bisa meningkat mbak yang diikuti pula naiknya penjualan mbak” (Bapak Ali).

Kondisi adanya pengembangan usaha dari penerima manfaat kegiatan SPP seperti yang sudah disampaikan oleh kedua fasilitator kegiatan SPP memang masih dalam persentase kecil. Sebab pinjaman yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok SPP juga masih kecil dan tidak menutup kemungkinan sebagian bantuan pinjaman modal dari SPP juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti pernyataan Ibu Septi KPMD Tanjungrejo yang memberi informasi anggota kelompok SPP yang usahanya terus meningkat, berikut ini:

“Ada satu kelompok yang saya ketua mbak yang saat ini juga ikut dalam verifikasi saat ini, ini mbak kelompok Petani Perempuan IV. Terus ini mbak yang usahanya terus berkembang Bu Istiqomah, Bu Khusnul, Bu Senimah dan Bu Amin mbak” (Ibu Septi).

Setelah mendapatkan informasi dari KPMD Tanjungrejo, peneliti mewawancarai Ibu Senimah anggota kelompok Petani Perempuan IV yang mengikuti kegiatan SPP, beliau menyatakan:

“Ya setelah dapat bantuan modal mbak saya sedikit-sedikit bisa nambah jualan saya mbak. Saya sekarang jualan sayuran dan lauknya, tapi juga jualan sosis sama snack mbak. Dulunya cuma sayuran saja mbak. Teman saya yang juga berjualan di depan SD dulunya juga cuma jualan snack mbak tetapi sekarang nambah jualan cilok dan es mbak” (Ibu Senimah).

Peneliti juga berusaha mewawancarai dan mengobservasi langsung anggota kelompok Petani Perempuan IV yang belum disebutkan oleh KPMD, berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dariyanik Sekretaris kelompok Petani Perempuan IV:

“Saya tidak ada usaha yang dikembangkan mbak, saya menulis diproposal ada usaha pracangan. Kalo tidak begitu saya tidak dapat pinjaman mbak. Kan uang pinjaman itu saya gunakan untuk membeli pupuk mbak untuk garap sawah membantu suami mbak. Anggota lain yang tidak punya usaha itu mbak juga ada, seperti Bu Insiah”(Ibu Dariyanik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaksana kegiatan dan anggota kelompok SPP dapat diketahui bahwa memang terdapat penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pinjaman dari SPP pengembangan usahanya meningkatkan. Hal ini terlihat dari anggota kelompok yang benar-benar memiliki usaha yang didanai oleh SPP. Walaupun peningkatan usaha mereka masih kecil namun ini mengindikasikan hasil kegiatan program yang positif. Penerima manfaat yang tidak ada perkembangan usahanya dari kelompok SPP Petani Perempuan IV ini adalah mereka yang memang tidak memiliki usaha dan dana bantuan tidak mereka pergunakan untuk membuka usaha. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa bagi penerima manfaat yang benar-benar memiliki usaha maupun penerima manfaat yang mempergunakan bantuan untuk membuka usaha pasti mampu mengembangkan usahanya dengan dana SPP tersebut.

b. Peningkatan Pendapatan

Peluang yang ada saat ini untuk meningkatkan pendapatan para ibu rumah tangga adalah dengan mendekatkan ibu rumah tangga ke bidang wirausaha yaitu dengan pengembangan usaha mikro. PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dengan memberdayakan kaum perempuan dengan jalan memberikan pinjaman modal dari dana SPP untuk menambah modal usaha warga perempuan tersebut.

Peningkatan pendapatan dapat tercapai apabila pemanfaat telah mampu mengembangkan usahanya setelah mendapatkan pinjaman modal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Khusnul selaku anggota kelompok Petani Perempuan IV yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP.

“Dengan adanya simpan pinjam ini, pendapatan saya meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya SPP ini mbak. Karena dengan adanya SPP ini saya bisa memperoleh pinjaman modal dengan mudah, bunga rendah dan tanpa agunan mbak sehingga saya bisa menambah usaha saya sehingga pendapatan saya ada peningkatan meskipun relatif sedikit mbak, tetapi cukup untuk membantu ekonomi keluarga mbak. Dulu susah mbak buat dapat pinjaman”(Ibu Khusnul).

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota kelompok petani perempuan IV yang lain yaitu Ibu Aminah, berikut hal wawancara peneliti dengan beliau:

“Dengan adanya simpan pinjam ini mbak, pendapatan saya satu bulan kira-kira antara Rp 400.000,00-Rp 500.000,- mbak, dulu hanya sekitar Rp 200.000,- kadang juga dibawah itu mbak. Pendapatannya cukup lah mbak buat bayar angsuran, tabunga sama uang jajan anak-anak mbak. Jadi bisa bantu suami cari penghasilan mbak. ”(Ibu Aminah).

Adanya kegiatan SPP ini sangat menguntungkan bagi para ibu rumah tangga miskin yang hanya memiliki pekerjaan berupa usaha kecil-kecilan dan susah dalam memperoleh ketersediaan modal yang bunganya sangat kecil dan tanpa agunan. Bantuan permodalan ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang tergolong dalam kategori rumah tangga miskin yang memiliki usaha agar usahanya bisa berjalan dengan baik dan jumlahnya meningkat sehingga pendapatan penerima manfaat SPP

meningkat pula. Berikut adalah tabel mengenai nama peminjam dan besarnya pinjaman dari kelompok Petani Perempuan IV:

Tabel 4.7 Besarnya Pinjaman Informan

Nama Peminjam	Besarnya Pinjaman	Pendapatan	
		Sebelum	Sesudah
Istiqomah	Rp 2.000.000	Rp 250.000,00	Rp 330.000,00
Khusnul Khotimah	Rp 2.000.000	Rp 150.000,00	Rp 400.000,00
Senimah	Rp 2.000.000	Rp 160.000,00	Rp 500.000,00
Dariyanik	Rp 2.000.000	-	-
Insiyah	Rp 2.000.000	-	-
Siti Aminah	Rp 2.000.000	Rp 200.000,00	Rp 450.000,00
Evi Rahayu	Rp 1.000.000	Rp 50.000,00	Rp 120.000,00

Sumber: Proposal Pengajuan Pinjaman SPP, 2014 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui besarnya pinjaman kelompok penerima manfaat menunjukkan besarnya pinjaman yang berbeda untuk setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok dalam mengajukan pinjaman ke SPP memang tidak dipaksakan harus sama besaran pinjamannya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan ketua UPK Kecamatan Wuluhan, berikut hasil wawancara dengan Bapak Faisal.

“Anggota kelompok yang ingin meminjam disini tidak diharuskan dengan jumlah pinjaman sama setiap anggotanya. Terserah setiap individunya mau meminjam berapa disesuaikan dengan kebutuhannya mbak dan yang penting batas maksimal pinjaman untuk saat ini Rp2.000.000 per orang mbak. ini disesuaikan dengan dana yang ada di UPK mbak.” (Bapak Faisal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK dapat diketahui bahwa setiap anggota kelompok perempuan yang ingin mengajukan pinjaman modal kepada SPP tidak harus mengajukan jumlah pinjaman yang sama. Penerima manfaat bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan mereka, akan tetapi ada batas maksimal masyarakat bisa mengajukan pinjaman yaitu sebesar Rp 2.000.000,00. Batas maksimal pinjaman ini disesuaikan dengan jumlah dana yang ada di UPK dan sewaktu-waktu jumlahnya juga bisa berubah.

Adanya dana SPP ini yang bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo dengan bunga yang ringan dan syarat yang mudah tanpa agunan ini dapat meringankan beban para kaum perempuan akan kemudahan akses pinjaman modal untuk keperluan pengembangan usahanya karena sebelum adanya SPP ini masyarakat perempuan sulit dalam mendapatkan akses permodalan untuk keperluan usahanya agar pendapatan mereka bisa meningkat walaupun sedikit. Kondisi sebelum adanya kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan, ibu-ibu Desa Tanjungrejo sulit untuk mendapatkan akses permodalan dikarenakan syarat yang terlalu sulit dan bunganya lebih banyak. Alokasi penggunaan dana SPP menurut Ibu Aminah dan Ibu Khusnul, beliau menjelaskan dengan adanya pinjaman modal SPP ini biasanya digunakan untuk menambah jumlah barang dagangan dan biasanya sebagian digunakan untuk keperluan anak sekolah. Sebelum adanya SPP ini, beliau kesulitan mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya karena syaratnya sulit dan bunganya besar. Maka dengan adanya SPP ini memberikan kemudahan dalam akses pinjaman modal bagi rumah tangga miskin untuk mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan walaupun jumlahnya sedikit.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui pula perubahan pendapatan yang dialami oleh penerima manfaat setelah adanya kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan. Penerima manfaat yang menggunakan bantuan pinjaman dana dari SPP sebagai tambahan modal usaha, pendapatan mereka mengalami peningkatan walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat rata-rata mereka yang pendapatannya meningkat sudah tidak mengalami kesulitan ekonomi. Pendapatan mereka sudah dapat membantu keluarga dalam mencukupi biaya kebutuhan hidup. Bagi penerima manfaat yang tidak menggunakan pinjaman dari SPP sebagai tambahan modal usaha tidak dapat dilihat perubahan pendapatannya, karena tidak terjadi peningkatan pendapatan. Pinjaman mereka gunakan untuk kegiatan konsumtif saja.

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Keberhasilan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang SPP di Desa Tanjungrejo

Indikator	Kondisi Ideal	Kondisi Sekarang	Skor	Ket.
Tujuan program	Mengurangi tingkat kemiskinan di desa melalui usaha mandiri masyarakat dengan cara kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan usaha ekonomi.	Tujuan Program ini selain untuk mengurangi jumlah kemiskinan, juga untuk meningkatkan keterampilan warga perempuan desa melalui program-program pembinaan warga dalam berwirausaha.	3	Baik
Sasaran penerima manfaat kegiatan SPP	Sasaran penerima manfaat kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif	Sasaran penerima manfaat di Desa Tanjungrejo ternyata bukan hanya masyarakat dalam kategori RTM, tetapi mereka yang dari kalangan masyarakat mampu juga menjadi penerima manfaat bahkan ada yang tidak memiliki usaha	2	Cukup baik
Fasilitator kegiatan SPP	Fasilitator kegiatan SPP memiliki tingkat pendidikan yang	Fasilitator kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo telah	2	Cukup baik

Indikator	Kondisi Ideal	Kondisi Sekarang	Skor	Ket.
	tinggi dan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang lebih untuk modal terjun memfasilitasi masyarakat desa	memiliki pendidikan yang baik yaitu semua pelaksana adalah lulusan S-1, untuk pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat para fasilitator sudah memahami betul sebab mereka sudah sering berkecimpung dalam program desa, sedangkan pengalaman yang dimiliki menjadi fasilitator tidak semuanya memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun		
Dana untuk Program Kegiatan SPP	Dana atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP itu mencukupi untuk mendanai pengajuan pinjaman dari kelompok perempuan.	Dana untuk PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP sudah mencukupi untuk kegiatan pendanaan pinjaman bagi kelompok perempuan yang mengajukan pinjaman	3	Baik
Sosialisasi program	Masyarakat desa memahami tujuan dan pentingnya PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP dan kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan.	Masyarakat desa belum memahami secara tepat apa itu PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang SPP, mereka hanya tahu ada pinjaman untuk modal usaha kecil. Dan kegiatan	1	Kurang baik

Indikator	Kondisi Ideal	Kondisi Sekarang	Skor	Ket.
		sosialisasipun hanya dilakukan selama tiga tahun.		
Pelaksanaan program kegiatan SPP	Setiap kegiatan dalam tahapan pelaksanaan SPP harus sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.	Dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa tanjungrejo masih ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.	2	Cukup baik
Partisipasi masyarakat	Masyarakat memiliki antusiasme tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPP	Masyarakat Desa Tanjungrejo memiliki antusiasme tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPP.	3	Baik
Pengembangan Usaha	Adanya kegiatan SPP dapat mengembangkan usaha penerima manfaat dibanding sebelum adanya kegiatan SPP	Pengembangan usaha penerima manfaat mengalami peningkatan	3	Baik
Peningkatan Pendapatan	Adanya kegiatan SPP dapat meningkatkan pendapatan penerima manfaat dibanding sebelum adanya SPP	Tersedianya pinjaman modal dengan mudah dari SPP sehingga masyarakat bisa meningkatkan usahanya dan selanjutnya diikuti dengan peningkatan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga	3	Baik

Sumber: Analisi Data Primer

4.3.5 Ketercapaian Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan

Ketercapaian pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pengurangan jumlah rumah tangga miskin, tingkat pengembalian pinjaman 100% dan kemudahan akses permodalan. Pengurangan jumlah rumah tangga miskin ini dilakukan melalui kegiatan bantuan permodalan bagi usaha rumah tangga miskin, diharapkan melalui kegiatan SPP ini masyarakat miskin yang menjadi pemanfaat dapat mengembangkan usahanya dan diikuti dengan peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil penilaian pada evaluasi produk diketahui bahwa kedua indikator aspek produk mendapat penilaian baik. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo sudah sesuai dengan target program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP yaitu pelaksanaan kegiatan SPP telah mampu membuat masyarakat penerima manfaat mengembangkan usaha mikro mereka dan selanjutnya pendapatan mereka juga meningkat, walaupun persentase peningkatannya masih relatif kecil.

Ketercapaian pelaksanaan kegiatan SPP ini dapat dilihat dari jumlah penurunan rumah tangga miskin di Desa Tanjungrejo selama kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP. Berikut hasil penurunan jumlah rumah tangga miskin di Desa Tanjungrejo disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.9 Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan

No.	Dusun	Jumlah RTM						
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014
1.	Grobyog	112	110	106	102	100	93	87
2.	Krajan Wetan	234	231	228	229	224	217	213
3.	Krajan Kulon	236	233	231	227	220	214	210
4.	Karangsono	145	144	139	130	124	120	97
Jumlah		727	718	704	688	668	644	607
Perubahan		0	-9	-14	-16	-20	-24	-37

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan SPP PNPM-MP Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan jumlah masyarakat miskin sudah mulai terjadi pengurangan. Penurunan jumlah RTM yang terjadi di Desa Tanjungrejo memang tidak terlalu banyak, namun hal ini sudah dapat sedikit mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Tanjungrejo melalui kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat perempuan di Desa Tanjungrejo.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan juga memiliki target lain yaitu pengembalian pinjaman 100%. Seperti keterangan ketua UPK Kecamatan Wuluhan saat diwawancarai oleh peneliti berikut ini:

“Target kegiatan SPP itu kesejahteraan masyarakat meningkat mbak, kedua usaha penerima manfaat SPP bisa berkembang dan ketiga tentunya pengembalian pinjaman lunas 100% mbak. itu semua adalah target program PNPM bidang SPP mbak, dan untuk Desa Tanungrejo mbak sudah mencapai target pengembalian 100%” (Bapak Faisal).

Pernyataan Bapak Faisal juga diperkuat dengan data yang peneliti peroleh dari hasil laporan pengembalian pinjaman SPP PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2014. Tingkat pengembalian pinjaman SPP oleh kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo disajikan pada tabel beriku ini:

Tabel 4.10 Tingkat Pengembalian Pinjaman SPP

Nama kelompok	% pengembalian
Arisan Perempuan Melati (P)	100 %
Pos PAUD Suplir 38 (P)	100 %
Posyandu Suplir 33 (1)	100 %
Posyandu Suplir 33 (2)	100 %
Yasinan Grobyog	100 %
Aisyiyah Karangsono 2	100 %
Petani Perempuan 1	100 %
Petani Perempuan II	100 %
Sema'an Nurul Iman IV	100 %
Sema'an Nurul Iman 5	100 %
Petani Perempuan 3	100 %
Petani Perempuan 4	100 %
Total	100%

Sumber: laporan pengembalian pinjaman SPP tahun 2014 (data diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil laporan pengembalian pinjaman SPP di Desa Tanjungrejo diketahui bahwa kegiatan pengembalian pinjaman SPP oleh kelompok penerima manfaat sudah mencapai target program yaitu pengembalian pinjaman 100%. Kegiatan pengembalian pinjaman yang sesuai dengan target program ini dapat memberikan penguatan untuk kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo.

Ketercapaian lain dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Desa Tanjungrejo adalah kemudahan akses permodalan bagi masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo. Kegiatan SPP bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan bantuan modal usaha. Tujuan ini bisa tercapai dalam kegiatan pelaksanaannya di Desa Tanjungrejo. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Septi berikut ini:

“Kelompok perempuan yang ikut SPP pada tahun 2009 hanya 9 kelompok saja mbak, kemudian sekarang sudah banyak mbak. bertambah menjadi 122 kelompok penerima manfaat” (Ibu Septi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septi selaku KPMD Desa Tanjungrejo diketahui bahwa target program PNPM Mandiri Pedesaan melalui kegiatan SPP untuk memberikan kemudahan akses permodalan bisa tercapai. Ketercapaian target ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah kelompok penerima manfaat yang berpartisipasi dalam kegiatan SPP. Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan SPP pada tahun pertama pelaksanaan hanya ada 9 kelompok perempuan, kemudian terus bertambah hingga totalnya menjadi 122 kelompok penerima manfaat.

Pelaksanaan kegiatan SPP sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan permodalan untuk usahanya, mereka mampu mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dan pendapatan mereka juga bertambah. Persentase pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan penerima manfaat memang tidak besar karena pinjaman yang diberikan kepada masing-masing penerima manfaat jumlah tiap banyak namun mereka bisa meminjam modal secara berkelanjutan.

Target selanjutnya yang juga telah tercapai adalah pengembalian pinjaman 100%. Setiap penerima manfaat di Desa Tanjungrejo selalu tertib dalam pembayaran dan pelunasan pinjaman SPP, mereka memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan kegiatan SPP ini. Karena kesadaran dari masyarakat untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu juga berpengaruh terhadap ketersediaan dana untuk keberlangsungan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Pembahasan masing-masing aspek dari model CIPP berikut dibawah ini:

4.4.1 Aspek Konteks (*Context*)

Aspek pertama dalam evaluasi CIPP adalah konteks. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan pendapat Stufflebeam (dikutip dari : Tayibnapis, F.Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta) bahwa evaluasi konteks sebagai fokus intitusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Analisis konteks dalam penelitian ini meliputi tujuan program dan sasaran penerima manfaat kegiatan SPP.

Analisis konteks tujuan program pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Tujuan adanya PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Lebih khusus lagi tujuan dari kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan

penciptaan lapangan kerja (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2014: 67). Berdasarkan hasil temuan evaluasi dapat diketahui bahwa tujuan program ini selain untuk mengurangi jumlah kemiskinan, juga untuk meningkatkan keterampilan warga perempuan desa melalui program-program pembinaan warga dalam berwirausaha.

Tujuan program ini juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Tanjungrejo. Masyarakat khususnya kaum perempuan membutuhkan bantuan permodalan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Sebagian besar kaum perempuan di Desa Tanjungrejo hanya sebagai ibu rumah tangga saja karena rata-rata tingkat pendidikan mereka masih tergolong dalam kategori rendah. Kenyataan lain, keadaan menuntut para kaum perempuan untuk mampu membantu mencukupi perekonomian keluarganya karena pendapatan suami mereka tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang kegiatan SPP sudah menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan akses bantuan permodalan untuk usaha mikro. Adanya kesesuaian antara apa yang diperlukan masyarakat Desa Tanjungrejo dengan latar belakang pelaksanaan program ini, diharapkan tujuan program ini untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di wilayah pedesaan dapat tercapai dengan maksimal.

Analisis selanjutnya yaitu pada sasaran penerima manfaat kegiatan SPP. Sasaran utama penerima manfaat kegiatan SPP berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:68) adalah rumah tangga miskin produktif yang membutuhkan bantuan permodalan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaksana kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo terdapat perbedaan persepsi antar pelaksana kegiatan. Menurut Ketua UPK yang berhak menjadi penerima manfaat itu bukan hanya RTM yang memiliki usaha saja tetapi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori RTM namun memiliki usaha tetap bisa menjadi penerima manfaat. Alasannya karena apabila yang menjadi pemanfaat adalah masyarakat miskin dikhawatirkan akan terjadi kesulitan pada saat pembayaran angsuran dan akhirnya akan mempengaruhi kegiatan program ini. Sedangkan menurut pendapat Satker PNPM Mandiri Pedesaan dan PJOK Wuluhan yang berhak menjadi penerima

manfaat adalah rumah tangga miskin yang produktif dan masyarakat miskin yang ingin membuka usaha namun kesulitan dalam kepemilikan modal. Jika disesuaikan dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan memang lebih tepat apabila yang menjadi penerima manfaat adalah rumah tangga miskin produktif, baik yang sudah memiliki usaha maupun akan membuka usaha agar tujuan program ini juga dapat tercapai dengan maksimal.

Perbedaan pendapat antar pelaksana kegiatan SPP terkait sasaran penerima manfaat dana BLM ini dapat diselesaikan dengan pelaksana lebih mengutamakan calon pemanfaat dari kalangan masyarakat miskin. Langkah yang dapat diambil untuk menghindari resiko terjadinya tunggakan pembayaran angsuran karena ketidakmampuan pemanfaat dalam membayar dapat disiasati dengan memberikan pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dana untuk kegiatan ekonomi produktif.

4.4.2 Aspek Masukan (*Input*)

Program PNPM Mandiri Pedesaan lebih melibatkan masyarakat mulai dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan. Sehingga dibutuhkan seseorang yang benar-benar kompeten dalam memfasilitasi masyarakat mulai dari tahap sosialisasi program dan kegiatan-kegiatannya, perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. Analisis input pada pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber tersedia yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan program. analisis input untuk PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP meliputi fasilitator kegiatan SPP dan Dana untuk program kegiatan SPP.

Fasilitator kegiatan SPP merupakan orang yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan program ini, mulai dari tahap sosialisasi sampai dengan pelestarian program. fasilitator kegiatan SPP ini merupakan informan utama dalam penelitian ini yang terdiri dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungrejo (KPMD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator

Kecamatan Wuluhan (FK), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Wuluhan dan Satker PNPM Mandiri Pedesaan. Mereka yang menjadi fasilitator dalam program ini dituntut memiliki kualifikasi yang tinggi diantaranya harus memiliki pendidikan minimal S-1, memiliki pengalaman menjadi fasilitator dan memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan evaluasi di Desa Tanjungrejo pelaksana kegiatan yang menjadi fasilitator kegiatan SPP telah memenuhi standar untuk menjadi fasilitator kegiatan SPP. Kelima informan utama telah memiliki pendidikan sampai S-1, memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat yang baik dan pengalaman menjadi fasilitator, walaupun masih ada beberapa fasilitator yang memiliki pengalaman kurang dari tiga tahun. Sehingga input program pada aspek fasilitator kegiatan SPP bisa dikatakan cukup baik.

Selain harus memiliki fasilitator yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, suatu program tidak akan bisa mencapai tujuan program dengan maksimal apabila tidak memiliki anggaran dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak pelaksana kegiatan SPP, dana yang tersedia dari APBN dan APBD sudah dapat mencukupi kebutuhan dana untuk kegiatan pencairan dana pinjaman untuk kelompok SPP dan untuk kegiatan operasional UPK. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:67) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Realisasi di Kecamatan Wuluhan terkait dana yang harus dialokasikan untuk kegiatan SPP juga sebesar 25% dari total dana yang diterima oleh kecamatan. Sejak tahun 2009 awal program dilaksanakan di Kecamatan Wuluhan hingga saat ini total dana yang ada di UPK untuk kegiatan SPP sebesar Rp 2.132.500.000,00. Tahun 2009 UPK Kecamatan Wuluhan menerima dana untuk kegiatan SPP sebesar Rp 750.000.000,00 dari total anggaran PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Wuluhan sebesar 3 Milyar.

Dana yang ada di UPK ini terus berkembang dari tahun ke tahun, selainnya dana yang ada direkening UPK semakin bertambah pinjaman modal yang diberikan kepada pemanfaat juga bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat kegiatan SPP diketahui bahwa pinjaman yang diterima semakin bertambah. Awal kegiatan program pemanfaat mendapat pinjaman modal sebesar Rp 1.000.000,00 untuk setiap orang dalam satu kelompok, kemudian tahun kedua pemanfaat dapat menerima pinjaman modal sebesar Rp 1.500.000,00 dan pada tahun ketiga pelaksanaan pemanfaat maksimal bisa mendapat pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana yang baik oleh para pelaksana kegiatan.

Secara keseluruhan analisis dari aspek input program ini dapat dikatakan dalam kategori baik. Fasilitator kegiatan program yang sudah memiliki kualifikasi yang baik untuk menjalankan tugas memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan SPP juga mencukupi untuk kebutuhan kegiatan operasional UPK sebagai pelaksana kegiatan maupun untuk kebutuhan pinjaman yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

4.4.3 Aspek Proses (*Process*)

Evaluasi proses ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas dalam praktek implementasi PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP. Tahap evaluasi proses yang perlu untuk dianalisis meliputi kegiatan sosialisasi program, pelaksanaan program kegiatan SPP dan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi program merupakan kegiatan memperkenalkan dan menginformasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan adanya suatu program. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan juga diperlukan kegiatan sosialisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa yang menjadi subjek pelaksanaan program ini terkait tentang tujuan program, prosedur pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program ini.

Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:1) bahwa proses sosialisasi dan penyebaran informasi tentang PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, baik dalam kegiatan khusus yang dibuat oleh program maupun kegiatan lain.

Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan yang dilakukan di Desa Tanjungrejo berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PJOK Kecamatan Wuluhan diketahui bahwa kegiatan sosialisasi di Desa Tanjungrejo dilakukan selama tiga tahun selama program berjalan yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2011 saja. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat di Desa Tanjungrejo sudah banyak yang paham dan mengerti tentang keberadaan program ini, sehingga dianggap masyarakat desa yang sudah paham dan mengetahui keberadaan program ini bisa membantu menyebarkan informasi tentang program ke masyarakat lain yang mungkin tidak hadir pada saat kegiatan sosialisasi. Namun kenyataan yang berbeda diketahui peneliti ketika melakukan wawancara dengan beberapa warga Desa Tanjungrejo yang juga menjadi penerima manfaat SPP justru tidak mengetahui jika ada PNPM Mandiri Pedesaan bahkan mereka tidak mengetahui nama kegiatan yang sedang mereka ikuti, mereka hanya diberi informasi bahwa ada pinjaman modal dengan bunga ringan dan syarat yang mudah di Kecamatan Wuluhan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi tidak paham mengenai program ini sehingga mereka hanya memberitahukan informasi tentang program yang kurang tepat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi di Desa Tanjungrejo kurang tepat pelaksanaannya dan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dilakukan tiga kali sosialisasi saja.

Kegiatan selanjutnya setelah analisis kegiatan sosialisasi program adalah pelaksanaan program kegiatan SPP. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan terdiri dari musyawarah desa dan MKP, verifikasi, MAD Prioritas Usulan, penetapan persyaratan dan penetapan daftar tunggu. Ada beberapa dari tahapan kegiatan tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Operasional PNPM Mandiri Pedesaan khususnya

bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Seperti pada kegiatan verifikasi dan penetapan persyaratan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan program. Pihak pelaksana kegiatan masih tidak mengetahui bahwa ada calon penerima manfaat yang tidak memiliki usaha dan akhirnya bisa lolos untuk mendapatkan pinjaman dana BLM SPP.

Penetapan persyaratan terkait dengan besarnya bungapun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi dari satker PNPM Mandiri Pedesaan bahwa besarnya bunga yang ditetapkan adalah sebesar 1,5%. Namun di Desa Tanjungrejo penerima manfaat dibebani bunga sebesar 2%, walaupun selisih 0,5% itu adalah untuk kegiatan operasional kelompok. Namun bila alasan pembebanan bunga sebesar 2% adalah untuk kegiatan operasional kelompok memang kurang efektif, bisa saja malah memberatkan pemanfaat yang berasal dari kalangan rumah tangga miskin. Biaya untuk kegiatan operasional kelompok dapat dibebankan dengan cara meminta iuran kepada setiap anggota kelompok pada saat pencairan dana SPP saja. Agar bunga yang dibebankan tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pedoman program ini.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang SPP sangat penting karena apabila masyarakat tidak antusias dalam kegiatan SPP, maka tujuan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengurangi kemiskinan melalui kemudahan akses permodalan dan memperbaiki perekonomian masyarakat tidak akan berhasil. Sehingga partisipasi masyarakat merupakan indikator yang sangat penting untuk sebuah pemberdayaan masyarakat karena masyarakat yang menjadi subjek pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan pendapat Anwas bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah bagaimana membuat suatu persuasi yang tidak memaksa kepada masyarakat (dikutip dari: Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta).

Masyarakat sangat aktif dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo. Bentuk partisipasi masyarakat dalam

kegiatan SPP dapat dilihat seperti pada kegiatan verifikasi data proposal pengajuan pinjaman modal, calon penerima manfaat semua datang dan tidak ada yang mewakilkan pada teman satu kelompoknya. Kemudian bentuk antusiasme lain dari masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan yaitu dari kelompok perempuan yang mengajukan pinjaman uang untuk modal usahanya. Pada tahun 2009 kelompok perempuan yang menjadi kelompok SPP hanya ada 9 kelompok saja, perkembangan setiap tahunnya terus meningkat hingga pada tahun 2014 terdapat 122 kelompok penerima manfaat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Berdasarkan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan SPP tidak sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan. Mulai pada tahap sosialisasi kegiatan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan SPP dirasakan kurang efektif dan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Padahal dari sisi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan SPP sangat tinggi. Seharusnya tahap pelaksanaan rangkaian kegiatan SPP tetap dilakukan sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan agar tujuan program ini dapat tercapai serta masyarakat nantinya juga merasakan dikecewakan terhadap keputusan para pelaku kegiatan program ini. Karena masyarakat dalam PNPM Mandiri Pedesaan juga berhak ikut serta dalam kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

4.4.4 Aspek Produk (*Product*)

Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:67) tujuan khusus dari kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha maupun sosial dasar; memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Analisis terakhir dari evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi CIPP adalah melakukan penilaian terhadap produk/hasil. Hasil yang ingin dicapai setelah pelaksanaan kegiatan SPP ini adalah terjadi pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan oleh penerima manfaat kegiatan SPP yang merupakan rumah tangga miskin. Melalui peningkatan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga miskin di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.

Salah satu indikator dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan untuk melihat kondisi perempuan yang meminjam dana BLM melalui SPP dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan observasi peneliti dapat diketahui bahwa penerima manfaat yang memang benar-benar menggunakan pinjaman modal dari SPP sebagai tambahan modal usaha mereka, perkembangan usahanya mengalami peningkatan. Seperti Ibu Senimah yang memiliki usaha warung yang letaknya berada di depan sekolah, setelah mendapat pinjaman modal SPP selama lima kali beliau mampu menambah barang dagangannya. Dulu sebelum mendapat bantuan modal Ibu Senimah hanya berjualan sayuran saja, namun saat ini beliau bisa menjual ikan, ayam dan lauk lainnya. Selain menjual kebutuhan sehari-hari rumah tangga beliau juga berjualan untuk anak-anak SD seperti sosis dan snack. Informasi dari KPMD Desa Tanjungrejo dari satu kelompok Petani Perempuan IV yang usahanya terus berkembang adalah Ibu Senimah, Ibu Amin, Ibu Istiqomah, Ibu Khusnul Khotimah dan Ibu Evi. Dalam satu kelompok tersebut terdapat 7 anggota, dua anggota kelompok lainnya usahanya belum bisa dikatakan meningkat. Kemudian peneliti melakukan observasi langsung ke rumah setiap anggota, memang untuk dua anggota tersebut tidak memiliki usaha kecil yang didanai dari pinjaman SPP. Dana yang diperoleh digunakan untuk kegiatan konsumtif dan ada yang digunakan untuk membantu usaha suaminya, misalnya membeli pupuk untuk lahan pertanian yang dikelola suaminya. Tindakan kedua pemanfaat ini memang kurang tepat dalam menggunakan pinjaman modal dari SPP.

Berawal dari pengembangan usaha yang semakin meningkat, keadaan pendapatan keluarga penerima manfaat tersebut semakin mengalami peningkatan. Berdasarkan temuan hasil evaluasi terhadap penerima manfaat kegiatan SPP, mereka yang usahanya meningkat merasakan juga peningkatan pendapatannya. Para ibu rumah tangga sekarang bisa membantu perekonomian keluarga melalui usaha kecil yang dikembangkan. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar angsuran SPP, belanja kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan SPP ini masyarakat secara mandiri mampu mengusahakan perbaikan ekonomi keluarganya masing-masing, sehingga tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah yang sifatnya langsung tanpa memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang ada, maka implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan program dan kurang tepat pada sasaran yang telah ditentukan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.

4.4.5 Ketercapaian Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan

Target program PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan dapat dilihat dari tujuan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP). Berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan (2014:58), kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Ketercapaian pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo adalah pengurangan jumlah rumah tangga miskin, tingkat pengembalian pinjaman 100% dan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil laporan akhir

kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan khususnya bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Pelaksanaan kegiatan SPP mampu memberikan kesempatan para penerima manfaat mengembangkan usahanya diikuti dengan keadaan pendapatan keluarga penerima manfaat tersebut yang mengalami peningkatan. Persentase peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh penerima manfaat memang tidak terlalu besar, peningkatan pendapatan masih cukup untuk pemanfaat gunakan sebagai biaya belanja kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, sebagian digunakan untuk tabungan yang bisa digunakan modal usaha atau keperluan mendadak lain dan juga cukup untuk membayar angsuran SPP setiap bulannya. Dengan adanya kegiatan SPP ini masyarakat miskin dapat secara mandiri mengusahakan perbaikan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Penurunan jumlah rumah tangga miskinpun juga terus bertambah banyak, pada saat awal pelaksanaan kegiatan SPP tidak terlalu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa kemudian selama proses pelaksanaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah RTM sebanyak 39 rumah tangga miskin.

Ketercapaian lain dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan yaitu mampu mewujudkan target pengembalian pinjaman 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap penerima manfaat di Desa Tanjungrejo selalu tertib dan disiplin dalam pembayaran dan pelunasan pinjaman SPP. Hal ini menunjukkan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kewajibannya membayar angsuran pinjaman pada kegiatan SPP dan sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan SPP yaitu menjaga keberlangsungan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Pelaksanaan kegiatan SPP sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk kegiatan bantuan permodalan usaha mikro milik masyarakat miskin. Jika dalam setiap pelaksanaan kegiatan UPK Kecamatan Wuluhan mampu mencapai tingkat pengembalian pinjaman 100%, dana dapat secara lancar digulirkan kembali kepada penerima manfaat yang mengajukan pinjaman.

Target program untuk memberikan kemudahan akses permodalan untuk masyarakat miskin pedesaan juga telah dapat dicapai selama kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan di Desa Tanjungrejo. hal ini ditunjukkan oleh jumlah kelompok perempuan semakin bertambah yang mengikuti kegiatan SPP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada saat tahun pertama pelaksanaan kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan, jumlah kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan ini hanya 9 kelompok saja. Setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatan SPP kelompok yang berpartisipasi semakin bertambah, hingga pada saat ini ada 122 kelompok perempuan yang menjadi penerima manfaat kegiatan SPP. Semakin banyak jumlah masyarakat miskin yang berpartisipasi dengan menjadi penerima manfaat menunjukkan bahwa ada kemudahan dalam mengakses pinjaman modal dari dana SPP.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Evaluasi implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Dalam model ini terdapat empat aspek yang dinilai dalam proses evaluasi yaitu aspek konteks, aspek input, aspek proses dan aspek produk. Berikut ini adalah hasil evaluasi tiap-tiap aspek tersebut:

1. Hasil evaluasi konteks yang meliputi: *pertama*, tujuan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat akan adanya program kegiatan yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin. *Kedua*, sasaran kegiatan ini adalah masyarakat miskin yang produktif atau memiliki usaha mikro. Sehingga dalam penilaian evaluasi konteks program ini layak untuk dilaksanakan di Desa Tanjungrejo untuk pengurangan jumlah masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja.
2. Hasil evaluasi input yang kuat meliputi SDM yang potensial dalam melaksanakan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo. Baik dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman menjadi fasilitator kegiatan dan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat sudah dimiliki oleh kelima pelaksana kegiatan SPP mulai dari satker PNPM Mandiri Pedesaan sampai pada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa semua memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi fasilitator kegiatan SPP dan ditunjang oleh anggaran dana yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan, baik untuk pencairan dana bagi pemanfaat maupun kegiatan operasional UPK.
3. Hasil evaluasi proses menunjukkan pelaksanaan yang kurang baik karena banyak tahapan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan. *pertama*, kegiatan sosialisasi yang tidak dilaksanakan

secara berkelanjutan hanya dilakukan 3 kali selama program berjalan sehingga banyak masyarakat yang tidak paham tentang tujuan dan prosedur pelaksanaan program ini bahkan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui nama-nama kegiatan dari program ini walaupun beberapa dari mereka juga menjadi pemanfaat kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan. *kedua*, dalam pelaksanaannya masih tidak memprioritaskan kalangan rumah tangga miskin, kebanyakan dari penerima manfaat program khususnya kegiatan SPP masih didominasi oleh golongan masyarakat mampu, serta pembebanan bunga untuk pemanfaat kegiatan SPP yang tidak sesuai dengan kesepakatan Kabupaten Jember sebesar 1,5%.

4. Hasil evaluasi produk/hasil sudah bisa dikatakan baik. Karena penerima manfaat yang berasal dari kalangan rumah tangga miskin justru dapat mengembangkan usahanya dan diikuti dengan peningkatan pendapatan walaupun jumlah tidak banyak. Pengecualian bagi pemanfaat yang tidak memiliki usaha, mereka juga tidak bisa mengalami peningkatan pendapatan karena bantuan pinjaman modal sepenuhnya digunakan untuk konsumsi. Dari hasil evaluasi ini, dapat diasumsikan bahwa tujuan program melalui pendekatan pemberdayaan ini mampu membuat masyarakat secara mandiri mengusahakan perbaikan kualitas ekonomi mereka.
5. Berdasarkan hasil evaluasi produk/hasil juga dapat diketahui ketercapaian implementasi PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP bahwa penerima manfaat yang benar-benar menggunakan modal pinjaman dari SPP sebagai modal usaha, penerima manfaat mampu mengembangkan usaha mereka dan selanjutnya diikuti dengan peningkatan pendapatan. Selain itu pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo juga berhasil mencapai target pengembalian pinjaman 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan SPP perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan masyarakat penerima manfaat. Selama ini pemanfaat program kegiatan SPP belum secara maksimal keberpihakannya terhadap rumah tangga miskin. Selama ini pemanfaat program khususnya bidang SPP masih didominasi oleh mereka-mereka yang sebenarnya cukup mampu. Bantuan yang diberikan masih belum diterima oleh warga masyarakat yang benar-benar masuk dalam daftar RTM. Memang dari segi perguliran dana jika bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar miskin terdapat dilema terhadap pelestarian kegiatan SPP. Untuk itu perlu kiranya diformulasikan agar terdapat pendampingan dari instansi-instansi terkait atau pihak UPK serta pengelola lain agar warga yang benar-benar miskin mendapatkan bantuan namun dengan tetap dalam bimbingan dalam pemanfaatan bantuan melalui usaha ekonomi produktif.
2. Terkait dengan beban bunga yang dibebankan kepada warga masyarakat Desa Tanjungrejo yang menjadi pemanfaat kegiatan SPP lebih baik tetap dibebankan sebesar 1,5% karena bila seperti saat ini beban bunga yang dibebankan sebesar 2% itu terlalu besar untuk mereka yang memang benar-benar miskin. Apabila 0,5% itu dibebankan dengan alasan untuk operasional kelompok lebih baik jika anggota kelompok dibebani iuran pada saat pencairan dana SPP saja misalnya setiap orang dibebani iuran Rp 5.000,00.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adi, Rukminto Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Segabai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Bahri, Efri S. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit FAM Publishing.
- BPS Kabupaten Jember. 2011. *Kecamatan Wuluhan Dalam Angka Tahun 2013/2014*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mutrofin. 2005. *Pengantar Metode Riset Evaluasi Untuk Kebijakan Program dan Proyek*. Laksbang Pressindo : Yogyakarta.
- Mutrofin. 2001. *Teks Pilihan Evluaasi Program Untuk Pemula*. Yogyakarta : PT. Kurnia Alam Semesta.
- Purnomo, Bambang. H, dkk. 2013. *Panduan Praktis Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Tayibnapi, F.Y. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Widoyoko, Eko Putro. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Calon Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal

Ari, Saptono. 2013. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat)*. Jurnal Econosains, Volume XI No. 2 : 29 – 54.

Dian Novitasari. 2011. *Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Djaelani, Supriyanti, dkk. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Proyek Gaduhan Sapi Potong di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara*. Buletin Peternakan, Vol.33(1) : 40-48.

Ivan Beny Mustofa. 2011. *Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan “Kampung Lele” Dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Karsidi, Ravik. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*. Jurnal Penyuluhan, Vol. 3 No. 2 : 136 – 145.

Mugiri dan Whyu Lestari. 2013. *Instrumen Evaluasi Program Dana Bos Model CIPP*. Journal of Educational Research and Evaluation, 2(1) : 7-11.

Internet

Badan Pusat Statistik. 2013. *Daftar Kemiskinan Penduduk Tahun 2014*. [www.Bps.Co.Id](http://www.bps.co.id). (diakses tanggal 10 September 2014).

Skripsi

Dhiyah Retno Puspitasari. 2008. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2008 di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Dalam Model Analisis Pembangunan Lembaga Milton J. Esman*. Tidak Diterbitkan. Skripsi Universitas Jember.

Regi Regiawan. 2011. *Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Tidak Dipublikasikan

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. 2014. Departemen Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Profil Desa dan Kelurahan*. 2013. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Lampiran A.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan</p> <p>(Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember)</p>	<p>Perkembangan pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo dapat dikatakan baik, dilihat dari dana SPP yang semakin banyak dan jumlah kelompok yang semakin bertambah setiap periodenya. Namun masih ditemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan diantaranya KPMD masih memberikan pinjaman kepada ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha. Hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan program PNPM Mandiri pedesaan. Selain itu, melihat besarnya dana pinjaman yang diberikan kepada kelompok SPP dimana kelompok secara mandiri harus mengelola dan mempertanggungjawabkan dana pinjaman tersebut. Oleh karena itu muncul permasalahan bagaimana implementasi dan</p>	<p>Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Context Evaluation, indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan program pada PNPM-MP bidang SPP 2. Sasaran penerima manfaat kegiatan • Input Evaluation, indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator kegiatan SPP 2. Kegiatan anggota dalam kelompok SPP 3. Dana/anggaran untuk 	<p>a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian</p> <p>b. Data sekunder, yaitu data yang dapat mendukung penelitian dan mampu menguatkan data primer</p>	<p>a. Metode Penelitian: Penelitian Evaluasi</p> <p>b. Tempat Penelitian: Metode <i>purposive area</i></p> <p>c. Metode Subjek Penelitian: metode <i>purposive</i></p> <p>d. Sumber data: Data primer dan data sekunder</p> <p>e. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>f. Analisis data: Metode deskriptif analisis, data yang terkumpul disesuaikan dengan kriteria pencapaian target yang telah ditetapkan kemudian dianalisis, dideskripsikan hasilnya untuk kemudian disimpulkan.</p>

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
	<p>ketercapaian implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.</p>		<p>program kegiatan SPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Process Evaluation, indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program SPP 2. Pelaksanaan program kegiatan SPP 3. Partisipasi masyarakat • Product Evaluation, indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan usaha 2. Peningkatan pendapatan 		

Lampiran B**TUNTUNAN PENELITIAN****Tuntunan Wawancara**

No	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Pelaksanaan kegiatan SPP, target kegiatan SPP, partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan SPP, kondisi kelompok perkumpulan yang mengikuti kegiatan SPP serta dampak adanya program kegiatan SPP bagi masyarakat desa.	Informan utama yaitu pihak pelaksana program kegiatan SPP Desa Tanjungrejo. Subjek penelitian meliputi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Fasilitator, petugas UPK dan satuan kerja PNPM Mandiri pedesaan.

Tuntunan Observasi

No	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan bidang simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP)	Pihak pelaksana program kegiatan SPP Desa Tanjungrejo yang meliputi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Fasilitator, petugas UPK dan satuan kerja PNPM Mandiri. Serta ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok SPP yang menerima pinjaman modal dari SPP Desa Tanjungrejo.
2.	Kondisi RTM sebagai penerima kegiatan SPP	
3.	Pemanfaatan dana pinjaman SPP	

Tuntunan Dokumen

No	Data yang ingin diperoleh	Sumber data
1.	Data penduduk Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, baik mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah penduduk yang belum bekerja serta jumlah kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.	Perangkat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan petugas UPK Kecamatan Wuluhan

**Lampiran C. PEDOMAN WAWANCARA
(Informan Utama)**

A. Identitas Informan Utama

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Jabatan Informan :

B. Pedoman Wawancara untuk KPMD Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan

1. Bagaimana kondisi Masyarakat khususnya kaum perempuan Desa Tanjungrejo?
2. Apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya kaum perempuan Desa Tanjungrejo untuk membantu mengatasi permasalahan mereka?
3. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat perempuan Desa Tanjungrejo?
4. Bagaimana proses sosialisasi program SPP pada masyarakat Desa Tanjungrejo?
5. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dana dari SPP?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dengan adanya program SPP?
7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo?
8. Siapa saja yang menjadi penerima manfaat Kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?
9. Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
10. Bagaimana dengan kondisi pendapatan penerima manfaat bila dibandingkan dengan sebelum mendapatkan bantuan permodalan?

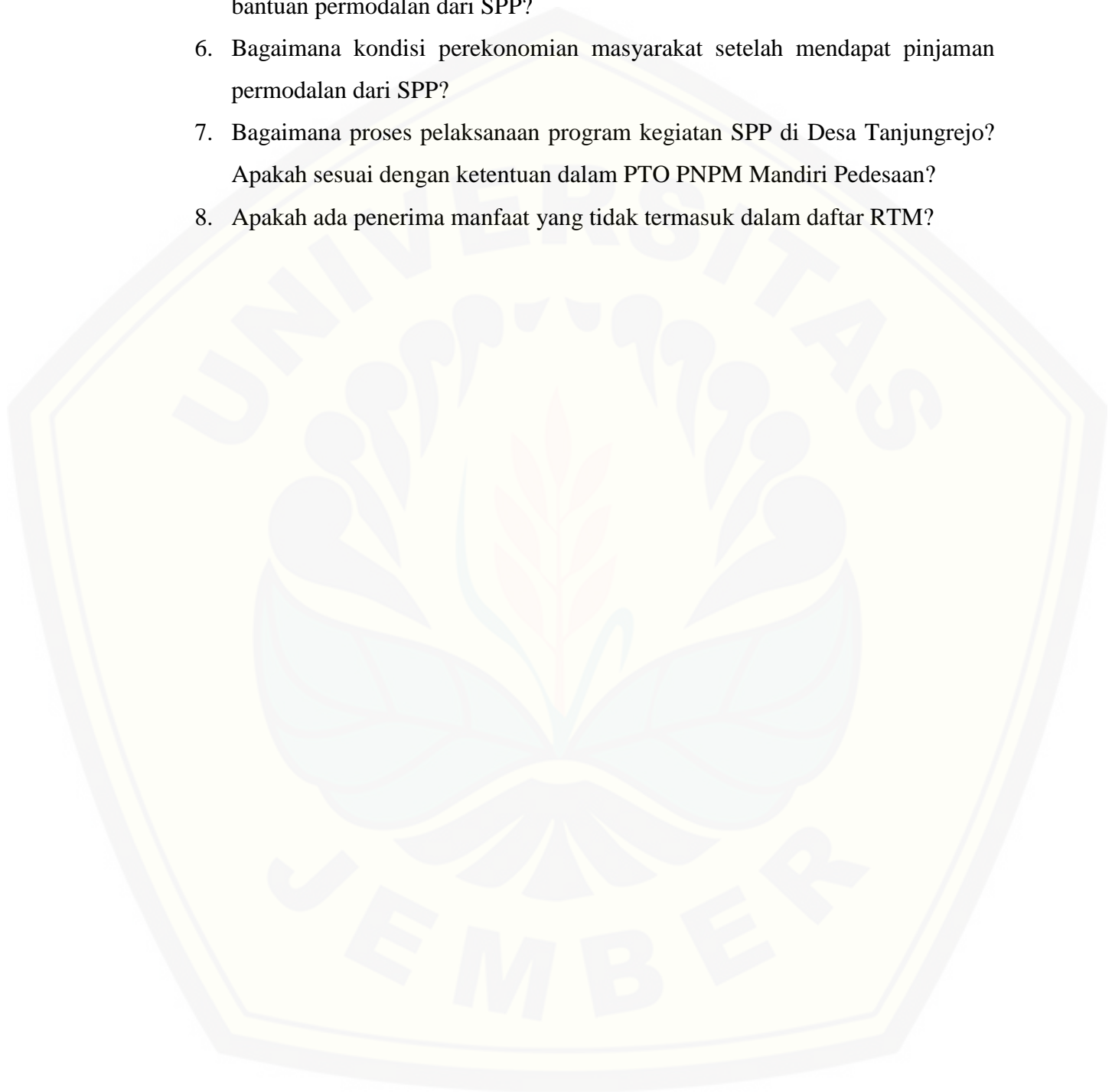
C. Pedoman Wawancara untuk Petugas UPK Kecamatan Wuluhan

1. Apa rencana kerja dari UPK untuk program kegiatan SPP di Kecamatan Wuluhan?
2. Bagaimana dana yang tersedia untuk kegiatan di bidang SPP?
3. Bagaimana perencanaan keuangan UPK untuk setiap periode kegiatan SPP?
4. Apakah kegiatan perguliran dana sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan?
5. Apa saja tugas dan tanggungjawab Anda sebagai pengurus UPK Kecamatan Wuluhan?
6. Bagaimana proses pemilihan kelompok perempuan yang akan mendapatkan bantuan permodalan?
7. Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?
8. Apakah pengurus sudah memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota RTM dalam pelaksanaan kegiatan SPP?
9. Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?
10. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan SPP?

D. Pedoman Wawancara untuk Fasilitator, PJOK dan Satuan Kerja PNPM Mandiri Pedesaan

1. Bagaimana kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dalam setiap kegiatan SPP?
3. Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?
4. Bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?

5. Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
6. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?
7. Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo? Apakah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan?
8. Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?



PEDOMAN WAWANCARA
(Informan Tambahan Penelitian)

A. Identitas Informan Tambahan Penelitian

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Usaha yang dikembangkan :

B. Latar Belakang Keluarga

1. Jumlah anak yang dimiliki :
2. Jumlah tanggungan keluarga :

C. Pedoman Wawancara untuk penerima manfaat kegiatan SPP

1. Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?
2. Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?
3. Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?
4. Berapa besarnya pinjaman yang Anda peroleh?
5. Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?
6. Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?
7. Apakah Anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?
8. Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?
9. Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
10. Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?
11. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?
12. Berapa lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

Lampiran D**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN UTAMA
(PELAKSANA KEGIATAN PNPM-MP BIDANG SPP)****A. Petugas UPK Kecamatan Wuluhan**

Identitas Informan Utama

Nama : Faisal Rizal

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1 Ekonomi

Jabatan Subjek : Ketua UPK

Bagian dari wawancara

P : Apa rencana kerja dari UPK untuk program kegiatan SPP di Kecamatan Wuluhan?

SP : Rencana kerja UPK untuk tahun ini menyempurnakan kinerja tahun kemarin mbak. Rencana sekarang perguliran dilakukan tiap bulan, musyawarah pendanaan dan MAD dilakukan reananya tiap bulan juga. Namun karena ada kendala kelompok kesulitan dalam pelengkapan berkas-berkas akhirnya realisasi rencana musyawarah pendanaan dan MAD dilakukan tiga bulan sekali. Tapi kalo pencairan bisa tiap bulan mbak disesuaikan dengan kelompok yang mengajukan. Dan sekarang kegiatan pencairan dilakukan satu hari satu desa mbak, tanggal sudah ditetapkan terlebih dulu, tidak seperti dulu yang satu hari bisa beberapa desa.

P : Bagaimana dana yang tersedia untuk kegiatan di bidang SPP?

- SP : Dana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Wuluhan berasal dari dua sumber yaitu APBN sebesar 30% dari setiap dana yang dicairkan dan APBD sebesar 20%, dari total anggaran dana tersebut mbak sebesar 25% adalah untuk kegiatan SPP. Sejak tahun 2009 hingga saat ini mbak dana untuk SPP berkembang menjadi Rp 2.132.500.000,-. Nanti untuk pencairan dilakukan secara bergiliran mbak gag semua kelompok, tergantung kelompok yang mengajukan proposal. Diawal pinjaman hanya Rp 1.000.000 per orang mbak, kemudian bertambah Rp 1.500.000,- dan berikutnya hingga sekarang pinjaman maksimal sebesar Rp 2.000.000 per orang mbak
- P : Bagaimana perencanaan keuangan UPK untuk setiap periode kegiatan SPP?
- SP : perencanaan mengikuti tahun sebelumnya jadi untuk kegiatan kegiatan ke depan mengacu dari kegiatan sebelumnya mbak dan mengacu pada kabupaten juga mbak harus ada tambahan kegiatan apa. Jadi istilahnya kita harus konsultasi dulu ke kabupaten. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan itu kegiatan bansos RTM, pelatihan namun belum pernah mendatangkan pihak ke tiga seperti mendatangkan bogasari gitu mbak yang dilakukan tiap tahun sekali, workshop produk dari semua kelompok.
- P : Apakah kegiatan perguliran dana sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan?
- SP : ya kita tetap pakek aturan PNPM, sebelum proposal diajukan di UPK mbak, memang terlebih dulu dimusyawarahkan dipilih wakil yang akan datang dalam MAD Prioritas Usulan mbak, selanjutnya diserahkan ke kantor UPK mbak. Kemudian dilakukan verifikasi di desa masing-masing untuk menentukan kelayakan kelompok yang mengajukan pinjaman

mbak. Kegiatan verifikasi ini rutin dilakukan mbak sebelum adanya penetapan kelompok mana yang mendapatkan pinjaman. Kegiatan ini dilakukan perdesa mbak dikantor desa tempatnya. Rata-rata kalo kelengkapan proposal setiap kelompok sudah lengkap itu semua kelompok lolos verifikasi mbak

P : Apa saja tugas dan tanggungjawab Anda sebagai pengurus UPK Kecamatan Wuluhan?

SP : Pelaporan keuangan keseluruhan mbak kemudian juga mengkoordinir seluruh kegiatan PNPM mbak.

P : Bagaimana proses pemilihan kelompok perempuan yang akan mendapatkan bantuan permodalan?

SP : Ya ada penetapan persyaratan mbak yang sudah tercantum dalam pedoman, misalnya minimal kelompok sudah satu tahun berjalan. Kelompok yang bisa mengajukan menjadi kelompok SPP misalnya kelompok pengajian, ormas, posyandu dan PKK mbak. Kelompok itu harus perdusun karena demi kemudahan koordinir kelompok mbak.

P : Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?

SP : target kegiatan SPP itu kesejahteraan masyarakat meningkat mbak, kedua usahanya berkembang dan ketiga tentunya pinjaman lunas 100% mbak.

P : Apakah pengurus sudah memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota RTM dalam pelaksanaan kegiatan SPP?

SP : sudah mbak.

P : Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?

SP : ada mbak. Jadi sasaran penerima manfaat dari PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP ini mbak adalah masyarakat miskin dan memiliki usaha kecil agar bisa dibina kemudian menjadikan mereka siap mandiri karena lapangan kerja saat ini semakin sulit mbak, apalagi untuk para ibu rumah tangga mbak. Namun kami selaku UPK juga menerima mereka yang bukan termasuk dalam daftar RTM tetapi memiliki usaha mbak, kalo RTM yang ingin punya usaha kami masih belum menerima mbak banyak resiko apalagi kalo kondisinya benar-benar miskin dan punya usaha kecil kami tidak kasi mbak. Sebab kalo miskin-miskin banget ya resiko tidak bisa mengembalikan pinjaman mbak. Daripada menanggung resiko seperti itu mbak, ini semua juga demi kelancaran kegiatan ini mbak.

P : Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan SPP?

SP : setiap tahunnya partisipasi masyarakat itu meningkat yang dapat dilihat dari lebih banyaknya jumlah anggota yang mengajukan pinjaman mbak

B. KMPD Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan

Identitas Informan Utama

Nama : Septining Indah W.

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1 Ekonomi

Jabatan Subjek : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Bagian dari wawancara

P : Bagaimana kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?

SP : Banyak ibu-ibu rumahtangga yang kesulitan mendapatkan modal untuk membuka ataupun membangun usaha kecil mbak, karena penghasilan suami mereka juga rata-rata pas untuk makan saja, tapi ibu-ibu didesa ini takut mbak mau pinjam dibank maklumlah mbak rata-rata kaum wanita disini pendidikannya mas tergolong rendah. ibu-ibu itu membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pinjaman modal dengan syarat yang tidak terlalu sulit

P : Apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo untuk membantu mengatasi permasalahan mereka?

SP : Ibu-ibu itu membutuhkan lembaga yang bisa memberikan pinjaman modal dengan syarat yang tidak terlalu sulit dan bunga yang ringan mbak untuk mereka membuka usaha atau mengembangkan usaha kecil untuk membantu perekonomian mereka mbak

P : Apa mayoritas pekerjaan masyarakat perempuan di Desa Tanjungrejo?

SP : Pekerjaan masyarakat perempuan disini rata-rata ya ibu rumah tangga saja mbak, kadang ada yang punya kerja sambilan seperti mlijo, usaha warung, pracangan, jual snack, jual bensin dan lain-lain. Ya rata-rata usaha mereka usaha yang bisa dikerjakan dirumah mbak.

P : Bagaimana proses sosialisasi program SPP pada masyarakat di Desa Tanjungrejo?

- SP : Kegiatan sosialisasi pada waktu itu dilakukan dikantor desa mbak, dengan mendatangkan perangkat desa dan pihak fasilitator kegiatan mbak, disini masyarakat desa yang ingin ikut, bebas untung datang mbak. Kegiatan sosialisasi dilakukan setahun sekali selama tiga tahun mbak.
- P : Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dana dari SPP?
- SP : Sistem pembayarannya tanggungrenteng mbak, jadi kalo misal ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran bulan ini ya ditanggung dulu oleh seluruh anggota kelompok mbak. Kemudian ya mbak anggota SPP disini dibebani bunga 2% setiap bulannya. Namun yang masuk di UPK tetap 1,5% mbak, sisanya yang 0,5% itu dana kesejahteraan kelompok mbak. Yah kadang uang itu digunakan untuk transportasi ketua kelompok mengurus pinjaman ataupun untuk kebutuhan fotocopi proposal mbak.
- P : Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dengan adanya program SPP?
- SP : Warga desa tanjungrejo itu sangat antusias mbak dengan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, bukan hanya warga laki-laki saja mbak, ibu-ibunya juga tidak mau ketinggalan. Kan ada program yang khusus untuk perempuan itu mbak yang namanya SPP itu mbak, setiap ada pertemuan juga datang mbak. Dan kelompok yang ikut SPP dulu tahun 2009 hanya 9 kelompok saja mbak sekarang jadi 122 kelompok mbak. Setiap verifikasi juga pasti datang semua mbak. Dalam membayar angsuranpun selalu tepat waktu mbak.
- P : Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Tanjungrejo?

- SP : ya Kepala Desa dan perangkat desa tentunya mbak, lalu saya sebagai kader desanya, UPK, PJOK yang mengawasi mbak, FK dan orang Bapemas mbak yang mengatur PNPM Mandiri Pedesaan itu mbak.
- P : Siapa saja yang menjadi penerima manfaat Kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?
- SP : Dalam ketentuan memang sasaran SPP adalah RTM yang produktif mbak tetapi tidak semua RTM itu punya usaha mbak, jadi bagi mereka yang ingin meminjam walau mereka bukan termasuk RTM juga tidak apa-apa mbak, yang penting mereka bisa membayar tepat waktu to mbak?? Mungkin mereka juga membutuhkan bantuan karena ada kebutuhan yang mendesak. Walau mereka bukan RTM tapi mereka punya usaha yang dapat didanai mbak.
- P : Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
- SP : Usaha Pemanfaat kegiatan SPP rata-rata meningkat mbak jika dananya tidak digunakan untuk konsumsi semua mbak. Ada satu kelompok yang saya ketuai mbak yang saat ini juga ikut dalam verifikasi saat ini, ini mbak kelompok Petani Perempuan IV. Terus ini mbak yang usahanya terus berkembang Bu Istiqomah, Bu Khusnul, Bu Senimah dan Bu Amin mbak.
- P : Bagaimana kondisi pendapatan penerima manfaat bila dibandingkan dengan sebelum mendapatkan bantuan permodalan?
- SP : Rata-rata untuk pemanfaat yang usahanya sudah bisa berkembang mbak itu pendapatannya juga bisa bertambah walaupun persentasenya masih kecil. Namun sampai saat ini untuk masyarakat Desa Tanjungrejo tidak

pernah menunggak mbak, jadi ya diasumsikan pendapatan mereka juga lancar kan mbak.

P : Berapa lama kelompok perkumpulan Petani Perempuan IV didirikan?

SP : Sejak tahun 2006 mbak.

C. PJOK Kecamatan Wuluhan

Identitas Informan Utama

Nama : Ali Muhsin

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1 Sosial Politik

Jabatan Subjek : PJOK Kecamatan Wuluhan

Bagian dari wawancara

P : Bagaimana kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?

SP : Begini mbak kondisi kaum perempuan di Desa Tanjungrejo itu kurang produktif. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya modal yang mereka miliki untuk membuka usaha sendiri. Misal ada yang sudah punya usaha mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka mbak, kan uang yang mereka peroleh dari usaha juga hanya cukup dibuat jajan anaknya. Sehingga disini mereka membutuhkan bantuan modal dan kalau bisa dengan bunga yang ringan juga mbak.

P : Bagaimana proses sosialisasi kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?

SP : Awalnya KPMD melakukan pendekatan pada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti kelompok PKK, jamaah tiban, kelompok

yasinan, dasa wisma, kelompok RT/RW kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi di kantor desa mbak. Kegiatan sosialisasi dilakukan dari tahun 2009,2010,2011 saja mbak. Karena masyarakat sudah paham kalau ada program SPP sehingga mereka bisa menyampaikan pada tetangga-tetangganya kalau ada kegiatan SPP dari PNPM Mandiri Pedesaan mbak. Kita menilai dari jumlah masyarakat yang semakin banyak untuk ikut.

P : Bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dalam setiap kegiatan SPP?

SP : Antusiame masyarakat untuk berpartisipasi itu sangat tinggi mbak, bahkan ada yang meminta untuk diadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk warga perempuan mbak

P : Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?

SP : Tujuan dari kegiatan PNPM bidang SPP adalah membuat masyarakat perempuan berdaya dan akhirnya mampu secara mandiri mengatasi permasalahan ekonomi keluarga yang dihadapi mbak melalui bantuan permodalan usaha kecil. Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha karena nanti disetiap akhir tahun UPK memberikan sejenis pelatihan-pelatihan kepada penerima manfaat. Nah, berdasarkan tujuan tersebut maka target dari program ini yaitu berhasil menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat desa mbak, kalo khusus untuk perempuan bisa berwirausaha mbak dan setelah berhasil mengembangkan usaha diharapkan pendapatan mereka bisa meningkat akhirnya bisa mengangkat perekonomian keluarga mereka mbak. Akhirnya bisa mengurangi jumlah keluarga miskin di Desa Tanjungrejo mbak.

- P : Bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?
- SP : Kalo bentuk pendampingan dan pengawasan pada kelompok SPP saya lakukan dengan pendekatan personal dan kekeluargaan pada ketua karena ketua kelompok pasti mengetahui kondisi tiap anggotanya mbak, misalnya bila ada anggota yang terlambat membayar 1 minggu pasti akan segera saya tangani dengan melakukan pendekatan personal agar orang tersebut mau menyampaikan alasannya. Kemudian kalo bentuk pendampingan dan pengawasan pada UPK yaitu melalui setiap bulannya FK dan UPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- P : Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
- SP : Perkembangan usaha rata-rata dari tiap kelompok SPP sudah meningkat mbak walau prosentasenya tidak banyak. Rata-rata usaha mereka masih sangat kecil mbak seperti usaha mlijo, barang-barang yang dijual macamnya jadi banyak setelah mendapatkan bantuan modal yang awalnya hanya menjual sayuran sekarang bertambah menjual daging ayam, sapi, ikan dll. Kalau yang pengrajin bisa menambah bahan bakunya kemudian produksinya bisa meningkat, dan diupayakan pelanggan juga bertambah sehingga bisa menambah pendapatan mereka mbak.
- P : Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?
- SP : jika dilihat dari cara penerima manfaat mengembalikan uang tepat waktu tiap kali angsurannya, tidak berbelit-belit, setor sendiri dengan datang ke UPK kemudian kooperatif dengan pihak UPK, jadi pengelolaan uang bisa

dikatakan sudah baik mbak. Hal ini juga bisa dijadikan tolak ukur perekonomian mereka juga baik walaupun skala perubahan keadaan ekonomi mereka tidak berubah banyak, perlahan tapi pasti mbak.

P : Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan?

SP : Pelaksanaan kegiatan SPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PTO, mungkin ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai seperti masih ada anggota pemanfaat SPP yang bukan dari rumah tangga miskin itu mbak.

P : Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?

SP : Ada mestinya mbak cuman saya tidak tahu pasti berapa angkanya. Diutamakan memang bagi yang mempunyai usaha dan mereka yang sungguh-sungguh ingin berusaha mbak. Namun harusnya sasaran utama kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo tetap berpedoman pada petunjuk PNPM Mandiri Pedesaan bahwa yang menjadi sasarannya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang membutuhkan pendanaan sebagai tambahan modal mbak. Kita juga tidak menutup kesempatan untuk mereka yang termasuk dalam RTM yang ingin membuka usaha juga boleh meminjam di SPP mbak.

D. Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Wuluhan

Identitas Informan Utama

Nama : Purwanto

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Jabatan Subjek : Fasilitator Kecamatan

Bagian dari wawancara

P : Bagaimana kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?

SP : Masyarakat perempuan di Desa Tanjungrejo itu rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga mbak, keadaan lain menuntut mereka untuk dapat membantu keuangan keluarga mbak, akhirnya membuat mereka membutuhkan suatu pekerjaan untuk menambah pendapatan keluarga. Namun lapangan pekerjaan juga susah mbak

P : Bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dalam setiap kegiatan SPP?

SP : Masyarakat sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan SPP mbak, misalnya kegiatan verifikasi setiap calon pemanfaat selalu hadir tanpa ada yang mewakilkan kepada anggota yang lain. Jumlah yang ikut dalam kelompok SPP juga sebanyak banyak mbak.

P : Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?

SP : Masyarakat dapat membuka lapangan kerja sendiri dengan jalan membuka usaha mikro dan pengembalian pinjaman 100% mbak

P : Bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?

SP : Bentuk pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan cara ikut mendampingi setiap kegiatan SPP di desa mbak, baik mulai tahap

sosialisasi, tahap verifikasi data calon pemanfaat maupun pada saat pencairan dana BLM kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman mbak. Kemudian memeriksa laporan UPK setiap bulannya mbak.

P : Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : Untuk anggota SPP yang memang benar-benar menggunakan uang dari SPP untuk usaha rata-rata usahanya bisa berkembang mbak. Misal ibu-ibu yang memiliki usaha mlijo barang dagangannya sebelum mendapatkan bantuan hanya sayuran dan lauk tahu tempe gitu aja mbak, setelah mendapat bantuan modal SPP mampu menambah barang-barang yang dijualnya mungkin bisa sekarang menambah jual daging, ikan maupun jumlah dagangannya yang dulu sudah ada semakin banyak

P : Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?

SP : Untuk anggota kelompok SPP yang sudah bisa mengembangkan usahanya mbak, kebanyakan kondisi perekonomian mereka juga membaik mbak. Mereka tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak.

P : Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan?

SP : Ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan PTO mbak, yaitu pemanfaat kegiatan SPP masih didominasi masyarakat yang bisa dikatakan dari kalangan mampu.

P : Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?

SP : iya ada mbak, tapi saya tidak bisa memberikan jumlah pastinya berapa.

E. Satuan Kerja (satker) PNPM Mandiri Pedesaan

Identitas Informan Utama

Nama : A. Anas Bastian
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1 Ekonomi
Jabatan Subjek : Satker PNPM Mandiri Pedesaan

Bagian dari wawancara

P : Bagaimana kondisi masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan?

SP : Masyarakat perempuan di Desa Tanjungrejo membutuhkan bantuan permodalan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan mbak sebagai modal usaha kecil milik mereka.

P : Bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Tanjungrejo dalam setiap kegiatan SPP?

SP : Masyarakat aktif berpartisipasi dalam setiap tahap proses kegiatan SPP ini mbak.

P : Apa saja target Program PNPM Mandiri Pedesaan bidang SPP di Kecamatan Wuluhan?

SP : Jumlah masyarakat miskin dapat berkurang walaupun jumlah pengurangannya sangat sedikit dan pinjaman dapat dikembalikan 100% ke UPK.

- P : Bagaimana bentuk pendampingan dan pengawasan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo?
- SP : Bentuk pendampingannya hadir pada saat pencairan dana ke UPK dan mendatangi kantor UPK untuk melihat kondisi keuangan dan kredit masyarakat mbak.
- P : Bagaimana perkembangan usaha setelah penerima manfaat mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
- SP : Usaha penerima manfaat kegiatan SPP yang berturut-turut jadi penerima manfaat bisa berkembang sedikit demi sedikit.
- P : Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?
- SP : Kondisi usaha yang terus berkembang juga diikuti dengan kondisi perekonomian keluarga yang juga meningkat mbak
- P : Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan SPP di Desa Tanjungrejo? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan?
- SP : Pelaksanaan kegiatan SPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PTO, mungkin ada beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai seperti masih ada anggota pemanfaat SPP yang bukan dari rumah tangga miskin itu mbak serta jumlah bunga yang dibebankan kepada masyarakat pemanfaat yaitu sebesar 2%, walaupun yang masuk ke UPK tetap 1,5% mbak yang 0,5% itu untuk operasional kelompok. Paling penting itu kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan memang harus dilaksanakan secara

berkelanjutan, minimal setahun sekali mbak. karena penting sekali membentuk pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya program ini.

P : Apakah ada penerima manfaat yang tidak termasuk dalam daftar RTM?

SP : Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan membina masyarakat untuk bisa mandiri. Nah untuk bidang SPP mbak tujuannya lebih khusus untuk membina kaum perempuan untuk bisa ikut berusaha memperbaiki perekonomian keluarga dengan usaha mandiri melalui usaha yang mendapatkan bantuan modal dari SPP mbak. Sasaran dari PNPM Mandiri Pedesaan bukan hanya masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha saja mbak tetapi juga untuk mereka masyarakat miskin yang bersungguh-sungguh ingin membuka usaha tetapi dia kesulitan dalam hal modal mbak. Seharusnya memang RTM yang menjadi prioritas mbak, untuk yang sudah mampu ya tidak dulu mbak. Karena tujuan utama program ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan di desa dan penyediaan lapangan kerja bagi warga desa mbak. Itu yang tetap harus menjadi penekanan bagi kita sebagai para pelaku program ini.

Lampiran E**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN TAMBAHAN
(PENERIMA MANFAAT SPP)****A. Identitas Informan Tambahan**

Nama : Istiqomah
Umur : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Usaha yang dikembangkan : Pracangan

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2
Jumlah tanggungan dalam keluarga : 4

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : Saya tau dari teman-teman mbak

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Tahun 2011 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : 5 kali berturut-turut sampai sekarang mbak

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : Dulu ditahun pertama Rp 1.000.000,00, kedua dan ketiga Rp 1.500.000,00 dan keempat sampai terakhir ini Rp 2.000.000,00 mbak

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Ya tentunya ingin mengembangkan usaha mbak dan memperbaiki perekonomian

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : Digunakan untuk tambahan modal menambah barang-barang yang ada dipracangan mbak dan juga sebagian untuk keperluan keluarga mbak

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : Alhamdulillah mbak tidak pernah, lagian saya juga takut mbak untuk telat takut tidak dikasi pinjaman lagi.

P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?

SP : Tidak pernah mbak kecuali kalau ada verifikasi dan pencairan uang SPP mbak

P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : yah sedikit demi sedikit saya bisa menambah jumlah jualan saya mbak

P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?

SP : yah bisa lah digunakan untuk bantu kebutuhan keluarga, jadi bukan hanya suami saja mbak yang bekerja. Saya dirumah juga bisa merawat anak sambil usaha.

P : berapa penghasilan Anda sebelum dan setelah mendapatkan mengikuti program SPP?

SP : sebelumnya Cuma Rp 250.000/bulan mbak dan setelah bisa mengembangkan usaha pracangan saya bisa dapat penghasilan sekitar Rp 300.000-Rp 330.000 per bulan mbak.

P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : pelayanan UPK sangat baik mbak,,,petugasnya telaten dan sabar, terus juga terbuka mbak semua petugasnya.

P : Berapa Lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

SP : sekitar 6 tahunan mbak.

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Senimah

Umur : 46 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Usaha yang dikembangkan : Warung

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2 orang

Jumlah tanggungan dalam keluarga : 6 orang

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : Diberi tahu Bu insiah mbak kalo ada program pinjaman dengan bunga ringan tanpa agunan, tapi saya tidak paham mbak program apa itu. Saya tidak pernah diberi tahu jika ada pengumuman dibalai desa mbak. Saya saja tau nama programnya itu SPP baru tau dari mbak.

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Tahun 2012 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : Yahhh sudah empat kali mbak, soalnya berturut-turut saya dapat mbak. Awal ikut dapat Rp 1.000.000,00, kedua dapat Rp 1.500.000,00 mbak, dua tahun selanjutnya dapat Rp 2.000.000,00 mbak.

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Yaaa motivasinya ingin usahanya berkembang mbak, bantu-bantu suami biyai anak sekolah mbak sama jajannya anak-anak mbak.

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : Dibuat belanja, biaya sekolah anak mbak, kalo-kalo ada kondangan itu juga mbak baru sisanya itu buat tambahan modal warung mbak.

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : Tidak pernah mbak. Saya takut kalau telat bisa dimarahi mbak dan takut tidak dapat pinjaman lagi.

P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?

SP : Tidak pernah mbak, ya cuma verifikasi sama pencairan dana itu aja mbak.

P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : Alhamdulillah berkembang mbak sedikit-sedikit, karena setiap kali dapat pinjaman tidak langsung saya habiskan untuk kebutuhan pribadi mbak selalu saya sisihkan untuk modal warung ini mbak. Awal sebelum dapat pinjaman saya hanya berjualan snack dan es didepan sekolah, kemudian tahun kedua saya bisa nambah jualan saya lagi mbak saya jualan sosis mbak sama sedikit sayuran gitu mbak. Tahun ketiga alhamdulillah tetap bisa nambah sampai kayak sekarang ini mbak nambah lauk-lauk mbak.

P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman modal dari SPP?

SP : Yah sedikit membaik mbak, saya bisa bayar uang sekolah anak rutin, masakpun juga bisa lengkap mbak, bisa punya pegangan uang tiap hari mbak jaga-jaga buat kalau ada yang sakit atau tonjokan nikah mbak. Yah tidak sampek utang ke tetangga gitu mbak.

P : Berapa penghasilan Anda sebelum dan setelah mendapatkan mengikuti program SPP?

SP : Penghasilan sebelum mendapat bantuan sebesar Rp 160.000,00/bulan kemudian setelah mendapatkan bantuan permodalan program SPP bertambah

menjadi Rp 500.000/bulan. Kurang lebihnya yaa segitu mbak. Gag tentu soalnya mbak.

P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : Pelayanan yang saya rasakan dari UPK ya sudah baik mbak, orangnya telaten dan terbuka soal keuangan mbak.

P : Berapa lama kelompok perkumpulan anda didirikan?

SP : Sudah enam tahunan mbak.

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Khusnul Khotimah

Umur : 45 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Usaha yang dikembangkan : Warung

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2 orang

Jumlah tanggungan dalam keluarga : 3 orang

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : saya dikasi tahu Bu insiah mbak kalo ada program pinjaman dengan bunga ringan tanpa agunan, tapi saya tidak paham mbak program apa itu. Saya tidak pernah diberi tahu jika ada pengumuman dibalai desa mbak. Saya baru dengar SPP itu dari mbak.

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Tahun 2012 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : Sudah empat kali mbak saya mendapat pinjaman modal ini mbak, dapat setiap tahun

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : Pinjaman yang pertama dapat Rp 1.000.000,-, kemudian yang kedua dapat Rp 1.500.000,- dan ketiga sama keempat naik lagi mbak boleh pinjam maksimal Rp 2.000.000,-. Itu pinjamannya diangsur selama 10x kali mbak. Sistemnya tanggung renteng mbak.

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Ingin Menambah modal buat usaha mbak agar usahanya tidak bangkrut mbak, soalnya kalo pendapatan dari suami tidak bisa dibuat usaha mbak, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Suami saya kan hanya buruh tani mbak. Kalo usaha saya berkembang nanti pendapatannya bisa ikut tambah mbak.

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : sebagian juga kena pakek buat bayar sekolah anak atau belanja gitu mbak, tapi tetap ada yang dibuat nambah usaha mbak.

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : alhamdulillah tidak pernah mbak, takut saya kalo sampek telat. Kan hasil usaha selalu saya sisihkan buat angsuran mbak.

P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?

SP : Tidak pernah mbak. Cuma verifikasi sama pencairan mbak. Kalo ada sosialisasi atau pelatihan pasti saya pengen ikut mbak, nambah-nambah ilmu buat saya mbak. Tapi tidak pernah ada pengumuman buat kumpulan pelatihan apa gitu mbak.

P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : Ya setelah dapat bantuan modal mbak saya sedikit-sedikit bisa nambah jualan saya mbak. Saya sekarang jualan sayuran dan lauknya, tapi juga jualan sosis sama snack mbak. Dulunya Cuma sayuran saja mbak. Teman saya yang juga berjualan di depan SD dulunya juga Cuma jualan Snack mbak tetapi sekarang nambah jualan cilok dan es mbak.

P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : Dengan adanya simpan pinjam ini, pendapatan saya meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya SPP ini mbak. Karena dengan adanya SPP ini saya bisa memperoleh pinjaman modal dengan mudah, bunga rendah dan tanpa agunan mbak sehingga saya bisa menambah usaha saya sehingga pendapatan saya ada peningkatan meskipun relatif sedikit mbak, tetapi cukup untuk membantu ekonomi keluarga mbak. Dulu susah mbak buat dapat pinjaman

P : Bagaiman pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : pelayanannya sudah baik mbak.

P : Berapa Lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

SP : Ada enam tahun sudah mbak.

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Dariyanik

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Usaha yang dikembangkan : Tidak ada

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2

Jumlah tanggungan dalam keluarga : 5

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : Saya diajak mbak Septi untuk ikut sosialisasi ada simpan pinjam dari program PNPM Mbak

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Saya ikut sejak tahun 2011 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : ya sudah lima kali mbak

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : yang pertama saya dapat Rp 1.000.000, kedua bertambah lagi boleh pinjam RP 1.500.000, untuk seterusnya saya dapat Rp 2.000.000 mbak

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : ya untuk biaya anak sekolah mbak, sama buat beli pupuk untuk sawah.

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : ya untuk biaya anak sekolah mbak, sama buat beli pupuk untuk sawah.

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : syukur alhamdulillah tidak pernah mbak.

P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?

SP : ya cuma kegiatan sosialisasi, verifikasi, MAD, sama pencairan, padahal saya ingin di kegiatan SPP itu ada pelatihan-pelatihan buat nambah keterampilan ibu-ibu gitu mbak

P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : Begini mbak sebenarnya saya tidak mempunyai usaha, modal pinjaman saya gunakan untuk membantu suami menggarap sawah, biasanya digunakan untuk membeli pupuk dan kebutuhan sehari-harinya. Tapi juga banyak kok mbak

yang lain juga tidak punya usaha, yang penting bayar angsuran tidak pernah telat. Itu teman saya satu kelompok Ibu Insiah juga tidak punya usaha mbak

P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman modal dari SPP?

Sp : Walaupun dapat pinjaman mbak perekonomian keluarga masih tetap mbak, kan kadang hasil panennya juga rugi mbak jadi tidak tentu mbak

P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : pelayanan sudah memuaskan mbak.

P : Berapa Lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

SP : sudah enam tahun mbak.

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Siti Aminah

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Usaha yang dikembangkan : Mlijo

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2 orang

Jumlah tanggungan dalam keluarga : 3 orang

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : saya dikasi tahu Bu insiah mbak kalo ada program pinjaman dengan bunga ringan tanpa agunan, tapi saya tidak paham mbak program apa itu. Saya tidak pernah diberi tahu jika ada pengumuman dibalai desa mbak. Saya baru dengar SPP itu dari mbak.

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : sejak tahun 2011 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : sudah lima kali dapat mbak.

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : Dapat Rp 1.000.000, Rp 1.500.000 dan dapat Rp 2.000.000 sudah tiga kali ini mbak

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Ya untuk mengembangkan usaha mlijo saya mbak, untuk tambah-tambah barang dagangan mbak. Karena hasil usaha juga untuk membantu ekonomi keluarga mbak.

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : Dibuat modal usaha pasti mbak, tapi sebagian juga ada yang digunakan untuk kebutuhan lain.

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : Tidak pernah mbak.

- P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?
- SP : Cuma kegiatan verifikasi, musyawarah sama pencairan dana SPP itu saja mbak. Wong tidak pernah ada kegiatan lain yang warga diminta untuk terlibat mbak.
- P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
- SP : Setelah mendapat pinjaman modal usaha saya bisa berkembang mbak. Dulu mlajo saya hanya jualan sayuran saja mbak paling lauknya cuma tahu, tempe sama ikan asin mbak. Setelah ada tambahan modal perlahan saya bisa nambah jualan buah mbak, terus sekarang lauk pauk itu lengkap ada ayam, daging sapi atau ikan-ikan laut gitu mbak. Jadi langganan saya sekarang bertambah mbak,,sekarang ibu-ibu pegawai itu belanja ke saya mbak karena jualannya lengkap mbak.
- P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman modal dari SPP?
- Sp : Dengan adanya simpan pinjam ini mbak, pendapatan saya satu bulan kira-kira antara Rp 400.000,00-Rp 500.000,- mbak, dulu hanya sekitar Rp 200.000,- kadang juga dibawah itu mbak. Pendapatannya cukup lah mbak buat bayar angsuran, tabungan sama uang jajan anak-anak mbak. Jadi bisa bantu suami cari penghasilan mbak.
- P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : Pelayanan yang diberikan oleh UPK sudah baik mbak, petugasnya terbuka sama warga mbak tiap mau ada pencairan maupun ada acara bantuan sosial tiap akhir tahun mbak.

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Insiyah
Umur : 51 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Usaha yang dikembangkan : -

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 1 orang
Jumlah tanggungan dalam keluarga : 2 orang

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : saya diberitahu pegawai kecamatan yang kebetulan menjadi PJOK Program ini.

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Sejak tahun 2010

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : sudah enam kali mbak

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : Awal Rp 1.000.000,00, kemudian dapat lagi sebesar Rp 1.500.000,00 dan selanjutnya Rp 2.000.000,00 mbak.

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Tidak ada mbak, kan mumpung ada kesempatan pinjaman dengan syarat mudah dan bunga ringan mbak. Kan memang sebenarnya tidak ada usaha mbak, yang diproposal cuma formalitas saja, apalagi tidak pernah ada survei langsung kerumah-rumah dari pelaksana mbak. Apalagi saya juga aktif dikegiatan ini mbak.

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : Yah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mbak. Untuk cicilan kan bisa diambilkan dari gaji pensiunannya bapak.

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

SP : Tidak pernah mbak.

P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?

SP : Saya pernah ikut kegiatan sosialisasi, MKP, MAD dan verifikasi gtu mbak

P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?

SP : -

P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman modal dari SPP?

Sp : -

P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : Pelayanan UPK sudah baik mbak.

P : Berapa Lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

SP : Enam tahun

A. Identitas Informan Tambahan

Nama : Evi Rahayu

Umur : 31 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Usaha yang dikembangkan : Pracangan

B. Latar Belakang Keluarga

Jumlah anak yang dimiliki : 2 orang

Jumlah tanggungan dalam keluarga : 4 orang

Bagian dari wawancara

P : Siapa yang memberi informasi pada Anda tentang adanya program kegiatan SPP?

SP : Saya tahu ada Simpan Pinjam kelompok Perempuan ini dari saudara saya mbak, katanya ada simpan pinjam khusus untuk perempuan dari PNPM dan itu pinjamannya tanpa agunan mbak cukup fotocopi KTP saya dan suami. Kemudian sistem kerjanya adalah Tanggungrenteng mbak.

P : Sejak kapan Anda mulai mengikuti kegiatan SPP?

SP : Sejak tahun 2014 mbak

P : Berapa kali Anda mendapatkan kesempatan menjadi penerima manfaat dari kegiatan SPP?

SP : 2 kali ini mbak

P : Berapa besar pinjaman yang Anda peroleh?

SP : saya tahun 2014 mendapat pinjaman Rp 1.000.000,00 dan tahun ini juga sama mbak

P : Apa motivasi Anda mengikuti kegiatan SPP?

SP : Ingin usaha saya bisa berkembang mbak dan menambah pendapatan keluarga

P : Digunakan untuk apa saja dana pinjaman SPP yang Anda peroleh?

SP : Sebagian saya gunakan untuk tambahan usaha dan sisanya saya gunakan untuk keperluan keluarga mbak

P : Apakah anda pernah terlambat membayar angsuran pinjaman?

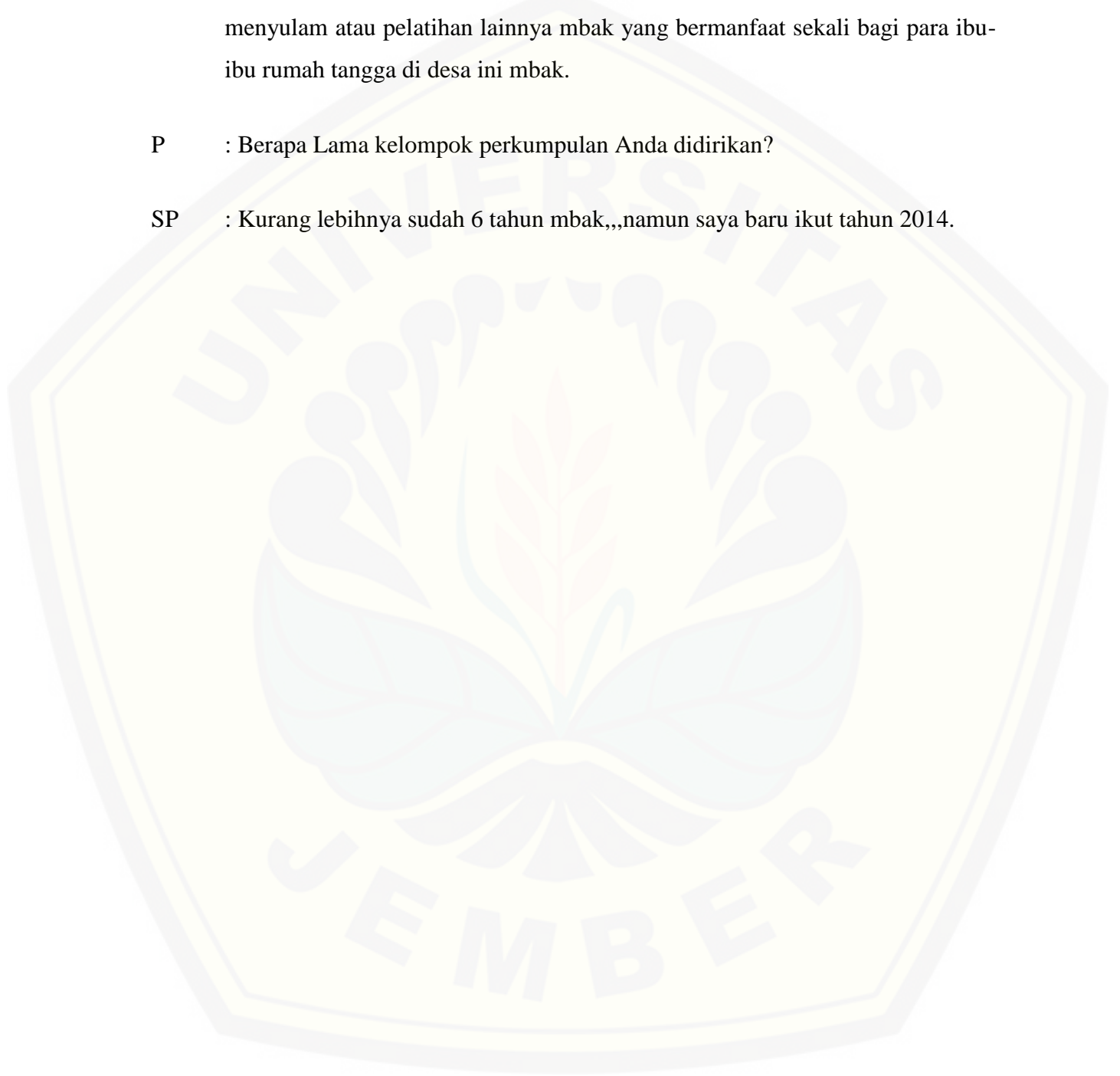
SP : Alhamdulillah belum pernah mbak. Lagipula uang yang d SPP juga uang bersama jadi takut merugikan yang lain mbak dan juga takut tidak dikasi kesempatan meminjam lagi di SPP mbak.

- P : Kegiatan pertemuan apa saja yang pernah Anda ikuti terkait dengan program kegiatan SPP?
- SP : Selain pertemuan untuk verifikasi data dan pencairan dana SPP belum pernah mbak. Sebenarnya saya pengen ada kegiatan pelatihan apa gtu mbak yang bisa memberi saya keterampilan tambahan.
- P : Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah mendapatkan bantuan permodalan dari SPP?
- SP : Usaha saya berkembang mbak walaupun masih kecil pertambahannya, karena langganan masih sedikit dan bantuan modalnya juga masih kecil mbak.
- P : Bagaimana kondisi perekonomian Anda setelah mendapat pinjaman permodalan dari SPP?
- SP : Bantuan modal dari SPP ini dapat membantu perekonomian keluarga saya mbak, bisa buat tabungan walau sedikit dan tambahan uang jajan anak mbak. Kadang tabungan itu digunakan untuk biaya anak sekolah mbak
- P : berapa penghasilan Anda sebelum dan setelah mendapatkan mengikuti program SPP?
- SP : sebelumnya Cuma Rp 180.000/bulan mbak dan setelah bisa mengembangkan usaha pracangan saya bisa dapat penghasilan sekitar Rp 200.000-Rp 220.000 per bulan mbak.
- P : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tim UPK dalam pemberian pinjaman?

SP : Sudah baik mbak, cuman kenapa kok ibu-ibu ini tidak diberikan pelatihan-pelatihan seperti membuat kue-kue kering, budidaya jamur atau ikan, menyulam atau pelatihan lainnya mbak yang bermanfaat sekali bagi para ibu-ibu rumah tangga di desa ini mbak.

P : Berapa Lama kelompok perkumpulan Anda didirikan?

SP : Kurang lebihnya sudah 6 tahun mbak,,namun saya baru ikut tahun 2014.



Lampiran F

PTO PNPM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan

- 1) Latar belakang kebutuhan dan proyeksi kegiatan usaha setelah mendapatkan peningkatan kapasitas.
- 2) Pendanaan yang mencakup: sumber pendanaan (swadaya, bantuan pemerintah lokal, BLM) dan penggunaan dana (pengadanaan prasarana-sarana, tenaga ahli, penyelenggaraan pelatihan), tahapan pendanaan, pertanggung jawaban pendanaan.
- 3) Materi/kurikulum peningkatan kapasitas.
- 4) Nara sumber dan tenaga ahli yang bertanggung jawab.
- 5) Jadwal pelaksanaan.
- 6) Rencana Pelestarian Kegiatan.
7. Kompilasi kebutuhan peningkatan kapasitas dalam satu desa menjadi satu paket kegiatan yang terdiri dari kebutuhan kelompok usaha ekonomi ataupun kelompok rumah tangga miskin.
8. Kelompok UEP yang dimaksud tidak terbatas pada kelompok yang telah menjadi pemanfaat dana bergulir yang dikelola UPK tetapi juga memberi kesempatan pada kelompok UEP lain yang ada di lokasi masing-masing.

4.5. KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Khusus bagi kecamatan yang telah memiliki aset dana bergulir diatas 2 milyar, dapat mendanai kegiatan SPP dari dana BLM reguler apabila dalam rata-rata 3 bulan terakhir memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengendapan kas dan bank SPP dibawah 15%
2. Memiliki kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5 dibawah 10%
3. Hasil penilaian tingkat kesehatan UPK tidak menunjukkan katagori "tidak sehat"

4.5.1. Tujuan dan Ketentuan

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

4.5.2. Ketentuan Dasar

- a. **Kemudahan**, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b. **Terlembagakan**, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c. **Keberdayaan**, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d. **Pengembangan**, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. **Akuntabilitas**, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

4.5.3. Ketentuan Pendanaan BLM.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

a. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP

1. Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. Ketentuan kelompok SPP

Ketentuan kelompok SPP adalah:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4.5.4. Mekanisme Pengelolaan

a. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

1. Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
2. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
3. Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.
4. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :
 - 1) Sekilas kondisi kelompok SPP;
 - 2) Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi Permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, Rencana Usaha dalam satu tahun yang akan datang, Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana;
 - 3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

b. Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

1. Penetapan Formulir Verifikasi.

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity) yaitu : penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas. Contoh Formulir ada di formulir PTO.

2. Proses Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
- 2) Persyaratan Kelompok

- 3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :
 - a. Permodalan
 - b. Kualitas Pinjaman
 - c. Administrasi dan Pengelolaan
 - d. Pendapatan
 - e. Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
- 4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
- 5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengandaftar rumah tangga miskin.
- 6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok :

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP				
Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
Ikatan pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan / ekonomi/ simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun
Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik.	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik.
Aturan kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
luran	Belum	Mempunyai	Mempunyai	Mempunyai

Indikator	Nilai = 1	Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
anggota	mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	iuran wajib , iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung - jawabkan	Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung - jawabkan

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut diatas dan memberikan nilai pada setiap indikator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikategorisasi menjadi :

1. **Kelompok Pemula** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator sampai dengan 9 (sembilan).
 2. **Kelompok Berkembang** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas)
 3. **Kelompok Siap/Matang** adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diatas 18 (delapan belas)
- 7) Pembuatan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.

c. MAD Prioritas Usulan.

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa.

Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan :

1. Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat
2. Kategori tingkat perkembangan kelompok
3. Hasil Penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita Acara TIM Verifikasi.
4. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

d. Penetapan Persyaratan.

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :

1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap;
2. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan;
3. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok;
4. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

e. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi :

1. Pengelolaan **Dokumen** UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, Pengelolaan Proposal Penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan dokumen penyaluran: kuitansi, SPPB.
2. Pengelolaan **Administrasi** meliputi: Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu pinjaman.

3. Pengelolaan **Pelaporan** sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman – SPP, Laporan Kolektibilitas – SPP, Necara, Laporan Operasional.

f. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

g. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

h. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:

1. Pelestarian Kegiatan

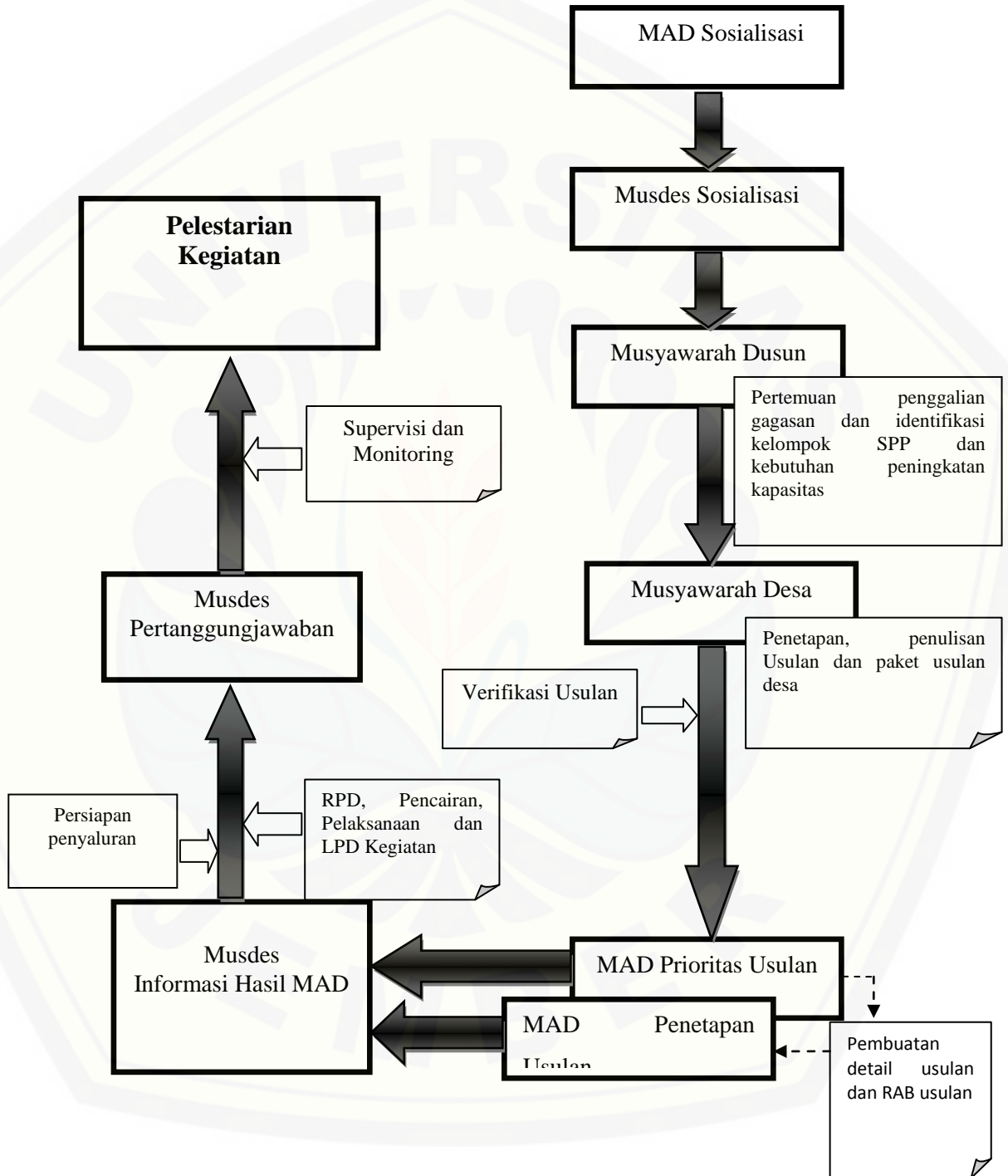
Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah :

1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.
3. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
4. Pengembangan layanan kepada masyarakat
5. Pengembangan permodalan.

2. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan Dana Bergulir.

Alur Kegiatan SPP



Alur Kegiatan SPP PNPM

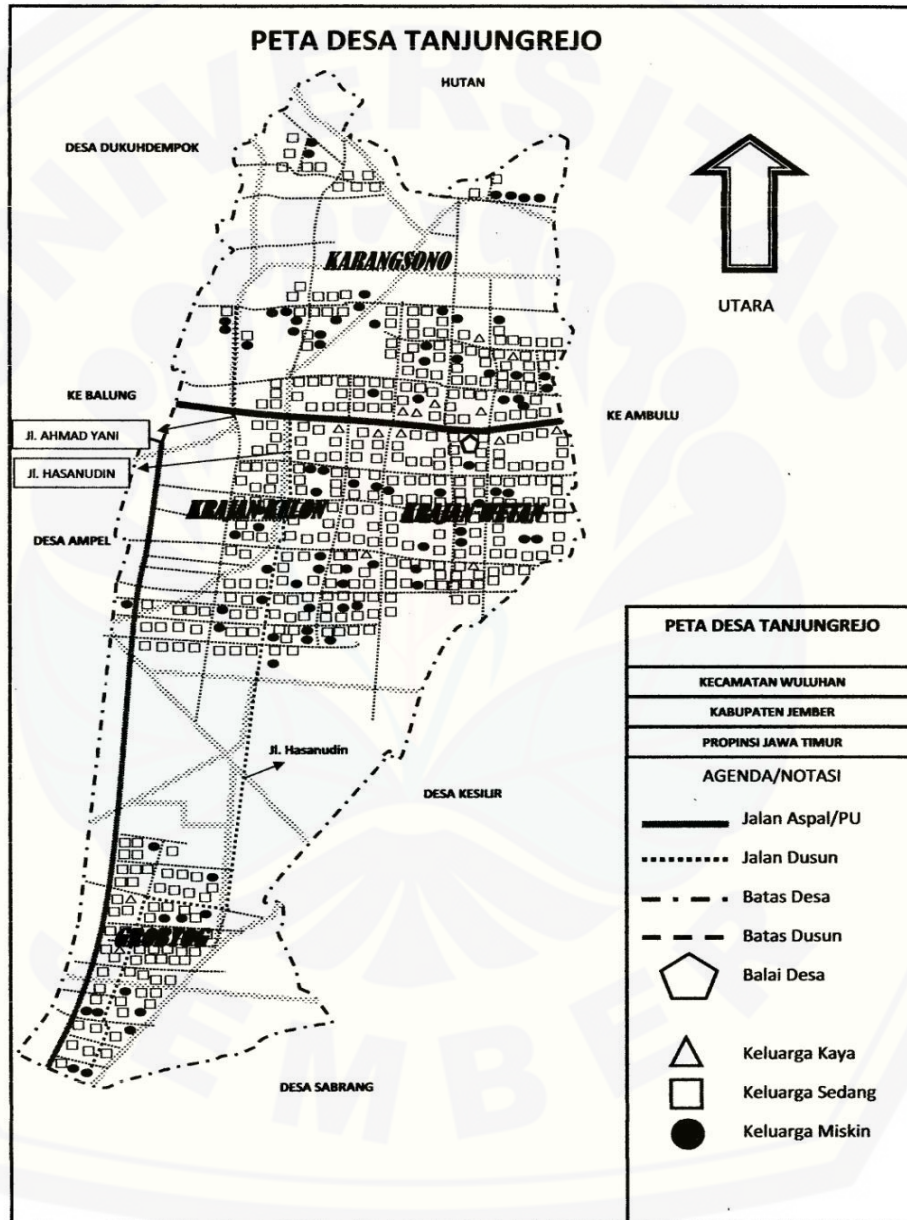
Lampiran G

STRUKTUR ORGANISASI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN WULUHAN



Lampiran H

PETA DESA TANJUNGREJO



Lampiran I

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1.
Wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Wuluhan



Gambar 2.
Wawancara dengan KPMD Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan



Gambar 3.
Wawancara dengan PJOK Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember



Gambar 4.
Wawancara dengan anggota kelompok Petani Perempuan IV yang menjadi penerima manfaat SPP



Gambar 5.
Kondisi salah satu usaha yang dikembangkan oleh anggota kelompok SPP



Gambar 6.
Kegiatan verifikasi kelompok SPP

Lampiran J

SURAT REKOMENDASI

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a
 Yth. Sdr. 1. Kepala Bapemas Kab. Jember
 2. Camat Wuluhan Kab. Jember
 di -
 J E M B E R

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 072/891/314/2015

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan FKIP Universitas Jember tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 2936/UN25.1.5/LT/2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Ratih Kumalasari 110210301037
 Instansi : Jurusan Pendidikan IPS / Prodi Pendidikan Ekonomi / FKIP / Universitas Jember
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian & Wawancara dengan judul :
 "Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan)".
 Lokasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jember dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.
 Tanggal : 19-05-2015 s/d 19-08-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
 Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 19-05-2015



An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris


 Drs. MOH. HASYIM, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 195902131982111001

Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Dekan FKIP Universitas Jember
 2. Ybs.


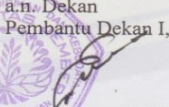
Lampiran K

SURAT IJIN PENELITIAN BAPEMAS

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121 Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988 Laman: www.fkip.unej.ac.id	
Nomor	: 2936 /UN25.1,5/LT/2015	18 MAY 2015
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Jember		
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.		
Nama	: Ratih Kumalasari	
NIM	: 110210301037	
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	
Program Studi	: Pendidikan Ekonomi	
Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan yang Saudara pimpin dengan judul: "Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan)".		
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.		
Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.		
 a.n. Dekan Pembantu Dekan I Dr. Sukatman, M.Pd NIP 19640123 199512 1 001		

Lampiran L

**SURAT IJIN PENELITIAN DESA TANJUNGREJO KECAMATAN
WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121 Telepon: 0331-334988, 330738 Fax: 0331-334988 Laman: www.fkip.unej.ac.id	
Nomor	2936 /UN25.1.5/LT/2015	18 MAY 2015
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Jember		
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini.		
Nama	: Ratih Kumalasari	
NIM	: 110210301037	
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	
Program Studi	: Pendidikan Ekonomi	
Berkenaan dengan penyelesaian studinya, mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan yang Saudara pimpin dengan judul: "Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan)".		
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.		
Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.		
		 a.n. Dekan Pembantu Dekan I, Dr. Sukatman, M.Pd NIP 19640123 199512 1 001

Lampiran M.

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA TANJUNGREJO
Jalan Raya Ambulu Nomor . 158 Tlp. (085257819119)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 475 / 409 / 135.09.11.2006 / 2015

Dengan ini Kepala Desa Tanjungrejo , Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Ratih Kumala Sari
Tempat Tgl Lahir : Jember, 03 Januari 1993
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dsn, Krajan RT. 003 RW. 005 Desa Andongsari
Kecamatan Ambulu - Kabupaten Jember

Yang tersebut diatas adalah benar-benar telah melakukan penelitian Skripsi tentang Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PMPN-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi kelompok perempuan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten pada bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 .

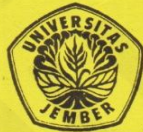
Demikian keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Tanjungrejo, 22 Juni 2015
Kepala Desa Tanjungrejo

Drs. Mohammad Yasin

Lampiran N

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
 Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ratih Kumalasari
 NIM/Angkatan : 110210301037
 Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/PendidikanEkonomi
 Judul Skripsi : Evaluasi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)
 Pembimbing I : Drs. Sutrisno Djaja, M.M

KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	T.T. Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	07-01-2015	Bab 1-2		
2.	15-01-2015	Revisi bab 1 dan 2		
3.		Bab 3		
4.	27-01-2015	Acc Seminar		
5.				
6.				
7.				
8.	11-06-2015	Bab 4 dan 5		
9.	15-06-2015	Revisi Bab 4 dan 5 + Lampiran		
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan:

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Kalimantan III/3 Kampus Tegalboto Kotak Pos 162
Telp./Fax (0331) 334988 Jember 68121

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama : Ratih Kumalasari
NIM/Angkatan : 110210301037
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/PendidikanEkonomi
Judul Skripsi : Evaluasi Implementasi Program Nasional Pernerdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Sekitar Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)
Pembimbing II : Dr. Sukidin, M.Pd

KEGIATAN KONSULTASI

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TT. Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	14-08-2014	Konsultasi Judul		
2.	8-01-2015	Bab 1 dan Bab 2		
3.	16-01-2015	Revisi bab 1 dan 2, Bab 3		
4.	29-01-2015	Revisi bab 1, 2 dan 3		
5.	13-02-2015	Revisi bab 1, 2 dan 3		
6.	13-02-2015	ACC Seminar		
7.				
8.	10-06-2015	Bab 4 dan 5		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan:

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Seminar Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi

Lampiran O**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas**

1. Nama : Ratih Kumalasari
2. Tempat, tanggal lahir : Jember, 03 Januari 1993
3. Agama : Islam
4. Nama Ayah : Marijadi
5. Nama Ibu : Sumiyani
6. Alamat
 - a. Asal : Jalan Kota Blater no. 144 RT. 003/ RW. 005 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Kode Pos: 68172
 - b. Jember : Jalan Jawa 2E No. 10 RW. 006 Lingkungan Tegalboto Kidul Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

**B. Pendidikan**

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN LULUS
1.	MIM 01 Watukebo	Jember	2005
2.	SMP Negeri 1 Ambulu	Jember	2008
3.	SMK Negeri 4 Jember	Jember	2011